

2024

RENCANA

KERJA

**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH**



KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Berkat Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya telah penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 dapat terselesaikan. Rencana Kerja ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026.

Laporan ini masih jauh dari kriteria sempurna, oleh karena itu kami mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak terutama dari Perangkat Daerah terkait pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk penyempurnaan dan pelaksanaannya.

Terima kasih atas kerja sama semua pihak yang telah memberikan sumbangsih pemikiran dan partisipasinya, dengan harapan pada implementasi pelaksanaan kegiatan nantinya dapat mencapai target yang telah ditetapkan serta memberikan dampak terhadap pelaksanaan Laporan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.

Benteng, 17 Maret 2023

KEPALA DINAS



ANDI ABDURRAHMAN, SE, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670526 199703 1 005



DAFTAR ISI

SAMPUL (HALAMAN JUDUL)	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulis	6
II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	61
2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	63
III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	69
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	70
3.3. Program dan Kegiatan	71
IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	75
V. PENUTUP	
5.1. Catatan Penting	77
5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	77
5.3. Rencana Tindak Lanjut	78
LAMPIRAN	79



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 yang secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan sesuai dengan Visi, Misi, (RKPD, RPJMD dan Renstra Pemerintah Daerah) dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu:

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program – program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan.
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (Stake holder) terhadap pembangunan.
4. Pendekatan Top – Down (Atas – Bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program – program jenjang pemerintah di atasnya.
5. Pendekatan Bottom – Up (Bawah – Atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake



holder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan, Top-Down dan Bottom-Up diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

Rencana kerja merupakan dokumen perencanaan yang telah disesuaikan dan menjadi pedoman serta rujukan dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2024 yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya, serta antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika pertumbuhan ekonomi daerah, serta mengacu pada kemampuan keuangan daerah, sehingga program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berdayaguna dan berhasil guna serta tepat sasaran.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.



9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang ubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
16. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 adalah untuk memberikan landasan strategis dalam kerangka pencapaian Visi, Misi dan Program Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar. Sebagai acuan/dasar bagi pelaksanaan program dan kegiatan guna membangun kinerja yang lebih akuntabel pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 tidak boleh dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam hal ini tujuannya adalah:

1. Menjadi acuan dalam mengoperasionalkan RKPd yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Menyelaraskan program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan.
3. Untuk menyesuaikan pandangan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022.



4. Dan dapat bermanfaat demi perbaikan dan peningkatan kinerja di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar di masa akan yang datang.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

IV. PENUTUP

- 4.1. Catatan Penting
- 4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
- 4.3. Rencana Tindak Lanjut



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

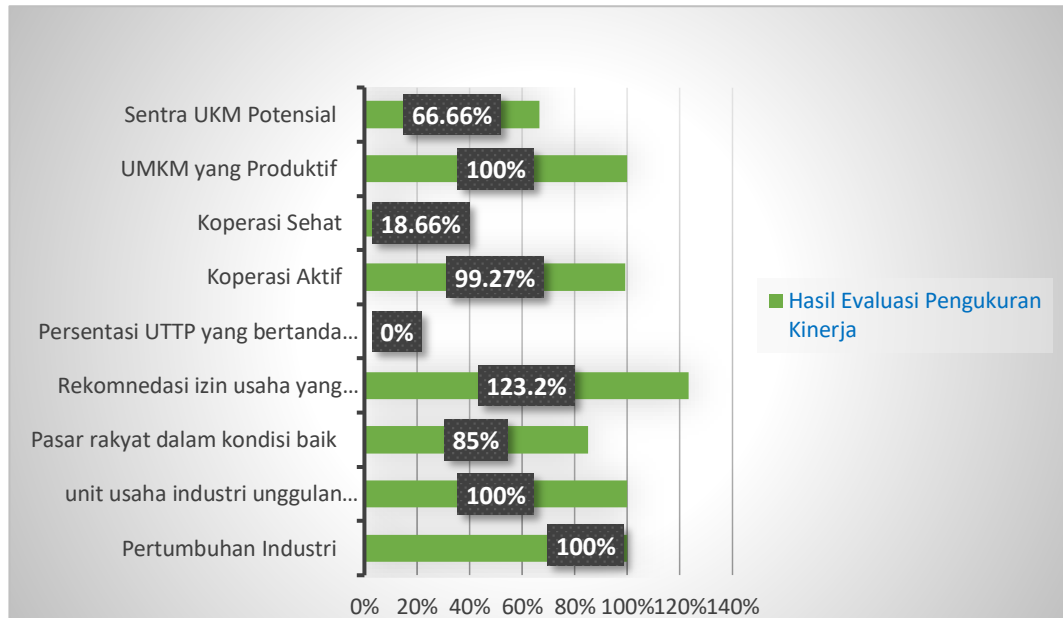
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi dan analisis kinerja akan dilakukan terhadap sasaran strategis atau hasil program / kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Evaluasi terhadap capaian-capaian kinerja merupakan sebuah tuntutan mengingat pesatnya dinamika masyarakat yang berdampak pada tuntutan akan penyediaan layanan oleh pemerintah yang semakin berkualitas, melalui pelaksanaan evaluasi kinerja yang digunakan secara periodik akan membantu sebuah organisasi dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Pencapaian sasaran terhadap penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah mencakup empat sasaran dalam rencana strategis sesuai misi Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD yang menjadi tanggung jawab Lingkup Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah :

1. Meningkatnya kualitas komponen manajemen kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
2. Meningkatnya kemandirian koperasi, IKM, dan UKM
3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha
4. Terbangun dan berkembangnya kawasan distribusi logistik (barang dan jasa).

Gambaran Umum Capaian Program Prioritas yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 – 2022 sebagai berikut:



Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan Lingkup Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar dibagi kedalam dua jenis urusan yakni urusan wajib dan urusan pilihan, dan pencapaian kinerjanya diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Untuk program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2022 terdapat program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu Metrologi Legal berupa Tera dan Tera Ulang.

2. Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Untuk program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan,



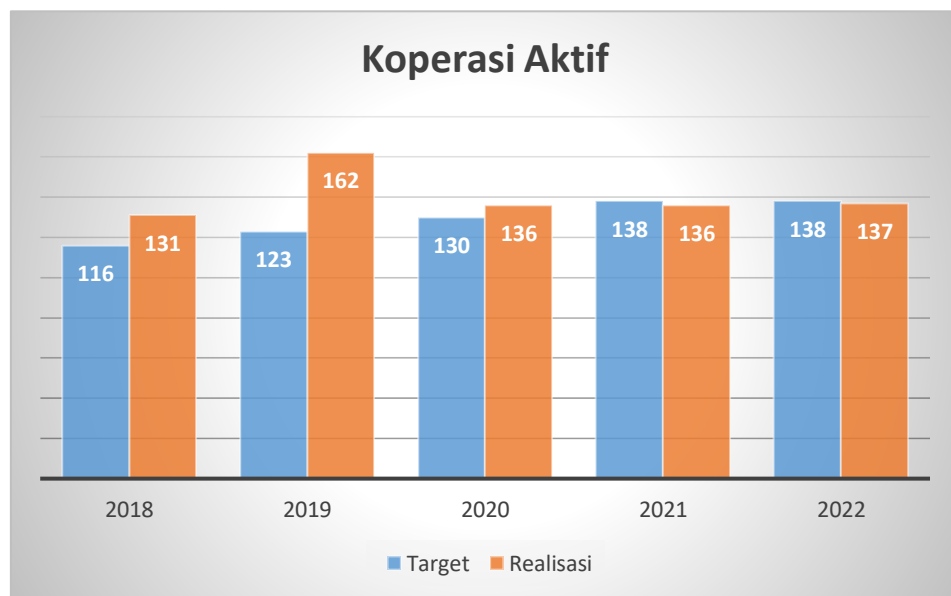
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Urusan Wajib yang dilaksanakan

Dalam aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan pilihan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sampai dengan tahun 2022 adalah :

Bidang Koperasi dan UKM

Secara garis besar pencapaian program dan kegiatan pada Bidang Koperasi tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Untuk pencapaian Sasaran IKU dapat digambarkan pada table dibawah ini :

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	2022		CAPAIAN (%)
		TARGET	REALISASI	
1.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan, Daya Saing dan Kemandirian Koperasi :			
	a. Persentasi Koperasi Aktif	138	137	99,27
	b. Persentasi Koperasi Sehat	150	28	18,66

- ✓ Jumlah koperasi aktif sampai dengan per 31 Desember 2022 adalah sebanyak 137 koperasi dari 168 koperasi yang ada.



- ✓ Menerima penghargaan dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia sejak tahun 2017-2022 sebagai Koperasi Berprestasi yaitu koperasi Kontue Toje', Koperasi Sadar dan Koperasi Primer Kepolisian.
- ✓ Hasil Pemutakhiran data koperasi se Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel berikut :

Persentase Koperasi Aktif Tahun 2018 - 2022

Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah koperasi aktif	131	162	136	136	137
2	Jumlah koperasi	161	81,48	165	165	168
3	Persentase koperasi aktif	81,37	132	82,42	82,42	81,55

Persentase Koperasi Aktif Menurut Kecamatan Tahun 2018 - 2022

Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kecamatan Benteng					
	Jumlah koperasi aktif	44	44	47	48	48
	Jumlah koperasi	63	63	65	66	67
	Persentase koperasi aktif	69,84	69,84	72,30	72,72	71,64
2	Kecamatan Bontoharu					
	Jumlah koperasi aktif	9	9	10	10	10
	Jumlah koperasi	10	10	11	11	11
	Persentase koperasi aktif	90	90	90,90	90,90	90,90
3	Kecamatan Bontomanai					
	Jumlah koperasi aktif	10	10	11	10	11
	Jumlah koperasi	12	12	13	13	13
	Persentase koperasi aktif	83,33	83,33	83,33	76,92	83,33
4	Kecamatan Bontomatene					
	Jumlah koperasi aktif	16	16	16	16	16
	Jumlah koperasi	18	18	18	18	18
	Persentase koperasi aktif	88,89	88,89	88,89	88,89	88,89
5	Kecamatan Buki					
	Jumlah koperasi aktif	5	5	5	5	5
	Jumlah koperasi	6	6	6	6	7

NO	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
	Persentase koperasi aktif	80	80	80	80	71,42
6	Kecamatan Bontosikuyu					
	Jumlah koperasi aktif	12	13	12	12	12
	Jumlah koperasi	15	16	15	15	15
	Persentase koperasi aktif	80	81	80	80	80
7	Kecamatan Pasimasunggu					
	Jumlah koperasi aktif	7	7	7	7	7
	Jumlah koperasi	8	8	8	8	8
	Persentase koperasi aktif	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5
8	Kecamatan Pastim					
	Jumlah koperasi aktif	4	4	4	4	4
	Jumlah koperasi	4	4	4	4	4
	Persentase koperasi aktif	100	100	100	100	100
9	Kecamatan Pasimarannu					
	Jumlah koperasi aktif	9	9	9	9	9
	Jumlah koperasi	9	9	9	9	9
	Persentase koperasi aktif	100	100	100	100	100
10	Kecamatan Takabonerate					
	Jumlah koperasi aktif	9	9	10	10	10
	Jumlah koperasi	9	9	10	10	10
	Persentase koperasi aktif	100	100	100	100	100
11	Kecamatan Pasilambena					
	Jumlah koperasi aktif	5	5	5	5	5
	Jumlah koperasi	6	6	6	6	6
	Persentase koperasi aktif	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3
	Total Jumlah koperasi aktif	131	132	136	137	137
	Total Jumlah koperasi	161	162	165	166	168
	Total Persentase koperasi aktif	81,37	81,48	82,42	82,53	81,55



Analisa capaian kinerja yang dipaparkan di bawah ini adalah kegiatan yang berjalan atau kegiatan yang berhasil dilaksanakan pada tahun 2022, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp.48.578.000,- dan terealisasi sebesar Rp.48.413.000,- dengan capaian output 99,66%. Ini dapat dijelaskan bahwa kegiatan ini berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun kegiatannya adalah Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan dana yang disediakan sebesar Rp. 48.578.000,- terealisasi sebesar Rp.48.413.000,- dengan capaian output 99,66 %. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

2. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp. 163.640.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 163.640.000,- dengan capaian output 100 %. Ini dapat dijelaskan bahwa program ini berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun kegiatannya adalah Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi dengan dana yang disediakan sebesar Rp. 163.640.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 163.640.000,- dengan capaian output 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini dianggap mencapai target atau sasaran yang diinginkan.



Beberapa faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pencapaian sasaran kinerja tahun 2022, adalah sebagai berikut :

1. Banyaknya koperasi yang kondisinya sudah tidak sehat, karena kurang dikuasainya manajemen koperasi oleh pengurus maupun anggota
2. Masih banyak Koperasi yang memerlukan bantuan fasilitas dalam mengembangkan usahanya
3. Akses pelaku usaha Koperasi terhadap layanan perbankan relatif rendah.
4. Kondisi pandemi covid-19 dan inflasi yang membatasi ruang gerak pelaksanaan kegiatan karena semuanya diarahkan ke penanganan covid-19 dan dampak inflasi.
5. Masih rendahnya pelaksanaan RAT
6. Adanya tunggakan penerima bantuan usaha
7. Kegiatan usaha tidak berjalan sebagaimana mestinya
8. Belum optimalnya pengelolaan sentra produksi
9. Terbatasnya tenaga terampil



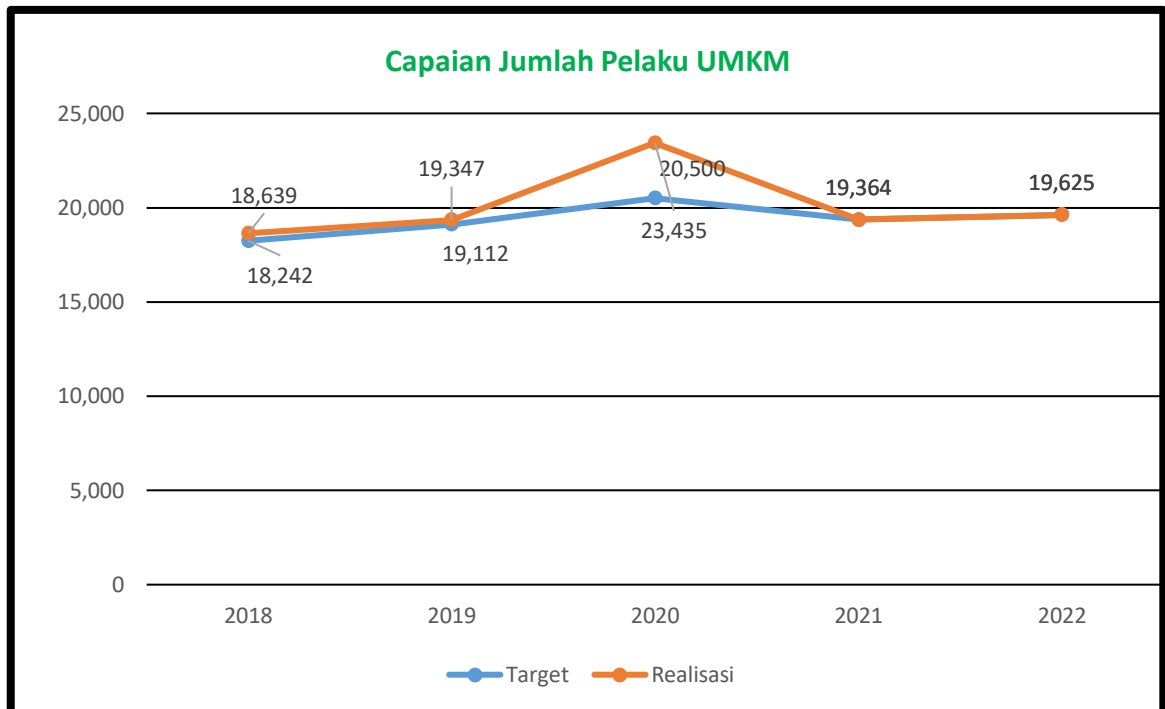
Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan kedepan, antara lain:

1. Melakukan penyuluhan, pembinaan dan pelatihan kepada Koperasi yang kondisinya sudah tidak sehat;
2. Mencari peluang anggaran pembinaan baik ke APBD Provinsi maupun APBN;
3. Menjalin kerjasama dengan pelaku usaha koperasi dan UMKM lainnya
4. Meningkatkan akses pelaku usaha Koperasi dan UMKM terhadap layanan perbankan.
5. Mengefektifkan penggunaan anggaran dalam setiap pelaksanaan kegiatan.
6. Mengoptimalkan penagihan terhadap penerima bantuan yang menunggak
7. Melakukan pendampingan untuk berjalannya kegiatan usaha koperasi
8. Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengelola UKM secara swadaya.
9. Program penciptaan, penguatan dan fasilitasi UMKM yang produktif

Capaian program dan kegiatan pendataan pelaku usaha se Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2018-2022 dapat disimpulkan bahwa :

1. JUMLAH USAHA MIKRO DAN KECIL MENENGAH

Gambaran umum pencapaian jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah se-Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Dalam pencapaian tahun ini, data pelaku UKM meningkat sekitar 1,3% dari tahun sebelumnya karena banyaknya pelaku usaha yang terdampak covid-19 dari berbagai sektor, baik dari sector pertanian, perikanan, perkebunan dan sektor lainnya.

Untuk pencapaian Sasaran IKU dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	2022		CAPAIAN (%)
		TARGET	REALISASI	
	Meningkatnya Kualitas UMKM			
a.	Persentase peningkatan UMKM yang produktif	350 UKM	350 UKM	100
b.	Persentase peningkatan sentra UKM potensial yang dikembangkan	45 UKM	30 UKM	66,66

Pada tahun 2022 persentase jumlah Usaha Kecil Menengah yang aktif yaitu 19.625 dan data terdaftar di SIKP sejumlah 4.875 UKM. Walaupun baru keluar dari pandemi Covid-19 dan terdampak inflasi para pelaku UKM tetap bisa berproduksi dan menjalankan usahanya dengan baik.





UKM secara keseluruhan dengan pendapatan rata-rata di range Rp. 1.000.000 s/d 5.000.000,- masih mampu bertahan di tengah merosotnya ekonomi global. Di tahun 2022 pasca pandemi Covid-19 masih terjadi inflasi yang berdampak pada penurunan omset pelaku usaha kecil dan menengah yang juga berakibat pada penurunan jumlah produksi. Adapun kendala-kendala yang dihadapi pelaku UKM diuraikan sebagai berikut :

1. Permodalan adalah salah satu masalah UKM yang utama. Efeknya para pelaku usaha tidak mampu mengembangkan usahanya dan meningkatkan jumlah produksinya untuk bisa meningkatkan pendapatannya.
2. Kurangnya pengalaman tentang manajemen usaha sehingga banyak dari pelaku usaha yang hanya fokus dalam memproduksi barang dan jasa namun tidak memikirkan cara ekspansi bisnis apalagi mereka kesulitan dalam meningkatkan bisnisnya dan usaha mereka pun hanya berjualan di tempat.
3. Kurangnya inovasi produk dalam hal meningkatkan daya saing bisnis. Para pengusaha seringkali di hadapkan pada kendala ketika melakukan inovasi produksinya.
4. Kesulitan dalam mendistribusikan produk karena selama ini kebanyakan pelaku UKM kekurangan pangsa pasar dalam hal mendistribusikan produknya dan belum memanfaatkan/mengoptimalkan pemasaran online.

Adapun harapan yang ingin dicapai untuk tahun kedepannya adalah :

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pembinaan UKM terus melakukan program pembinaan dan pengembangan UKM. Berbagai program secara berkesinambungan terus dijalankan. Yaitu pertumbuhan wirausaha baru, pengembangan produk



UKM, peningkatan kemampuan sentra serta pemberian bantuan peralatan produksi.

UKM di Kabupaten Kepulauan Selat selayaknya mendapat perhatian besar dari Pemerintah, khususnya dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Sebab UKM merupakan kegiatan ekonomi kerakyatan yang secara signifikan telah banyak memberikan kontribusi kepada Daerah Kabupaten Kepulauan Selat dalam mewujudkan kemandirian ekonomi.

Selain pembinaan yang selama ini di laksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bidang Koperasi dan UKM, juga tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan adalah pengembangan wirausaha baru. Bidang Koperasi dan UKM terus mendorong wirausaha baru agar menjadi lokomotif penggerak perekonomian daerah serta berperan dalam menanggulangi pengangguran dan menghambat urbanisasi.

Analisa capaian kinerja yang dipaparkan di bawah ini adalah kegiatan yang berjalan atau kegiatan yang berhasil dilaksanakan pada tahun 2022, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp. 553.147.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 550.074.000,- dengan capaian output 99,44%. Ini dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai. Selanjutnya diuraikan beberapa kegiatannya sebagai berikut :

a. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro



Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 79.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 79.344.000,- dengan capaian output 99,93%. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

b. Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro

Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 203.074.000,- terealisasi sebesar Rp. 202.677.200,- dengan capaian output 99,80%. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

c. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 237.160.000,- terealisasi sebesar Rp. 234.560.000,- dengan capaian output 98,90%. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

d. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro

Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 33.513.000,- terealisasi sebesar Rp. 33.492.800,- dengan capaian output 99,94%. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

2. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp. 4.170.915.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.428.412.500,- dengan capaian output 82,20%. Ini dapat dijelaskan bahwa program ini berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun kegiatannya adalah Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan

Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi dengan dana sebesar Rp. 4.170.915.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.428.412.500,- dengan capaian output 82,20%. Hal tersebut menjelaskan bahwa kegiatan ini berjalan sesuai dengan target.



1. Jumlah / Jenis / Pelaku UKM.

I. Rekap Database Pelaku Ukm

JUMLAH KESELURUHAN PELAKU UKM	19.625 ORANG
----------------------------------	--------------

II. Rekap Daftar Nama-Nama Kelompok Penerima Bantuan

Total keseluruhan jumlah penerima bantuan dari tahun 2018-2022 sebanyak 500 kelompok, dengan jumlah unit sebanyak 2.183 unit bantuan peralatan.

Anggaran Pengadaan Peralatan Tahun 2022 Sebesar Rp. 961.277.000,- terdiri dari :

No	Jenis Pengadaan	Jumlah Kelompok	Jumlah Unit
1	Pengadaan Alat Depot Air Minum	2 Kelompok	2 unit
2	Pengadaan Amdk	1 Kelompok	1 Unit
3	Pengadaan Masak Memasak	11 Kelompok	55 Unit
4	Pengadaan Mesin Jahit	6 Kelompok	35 Unit

5	Pengadaan Mesin Parut Kelapa	7 Kelompok	35 Unit
6	Pengadaan Alat Pertukangan	10 Kelompok	70 unit
7	Pengadaan Perbengkelan	8 Kelompok	73 Unit
	Jumlah	45 Kelompok	271 Unit

Anggaran Pengadaan Peralatan Tahun 2018 Sebesar Rp. 1.997.459.250,- Yang Terdiri Dari Tabel Berikut Ini:

No	Jenis Pengadaan	Jumlah Kelompok	Jumlah Unit
1	Pengadaan Parut Kelapa	22 Kelompok	67 Unit
2	Pengadaan Alat Pengelolaan Ikan	20 Kelompok	60 Unit
3	Pengadaan Alat Pertukangan	22 Kelompok	22 Unit
4	Pengadaan Mesin Jahit Dan Obras	37 Kelompok	40 Unit
5	Pengadaan Oven Kue	20 Kelompok	20 Unit
6	Pengadaan Alat Vacum Pres	32 Kelompok	94 Unit
7	Pengadaan Alat Pemecah Kulit Kemiri	11 Kelompok	11 Unit
8	Pengadaan Mesin Pengereng	12 Kelompok	12 Unit
9	Pengadaan Mesin Press Emping	16 Kelompok	16 Unit
10	Pengadaan Alat Kerajinan	17 Kelompok	272 Unit
	Jumlah	209 Kelompok	614 Unit

Anggaran Pengadaan Peralatan Tahun 2019 Sebesar Rp. 1.258.575.000,- Yang Terdiri Dari Tabel Berikut Ini:

No	Jenis Pengadaan	Jumlah Kelompok	Jumlah Unit
1	Pengadaan Alat Perajang Keripik	15 Kelompok	105 Unit
2	Pengadaan Mesin Jahit Dan Obras	12 Kelompok	60 Unit
3	Pengadaan Mesin Pencetak Batu Merah	5 Kelompok	5 Unit
4	Pengadaan Alat Pertukangan	17 Kelompok	119 Unit
5	Pengadaan Alat Masak Memasak	25 Kelompok	550 Unit
6	Pengadaan Pengupas Sabut Kelapa	5 Kelompok	5 Unit
7	Pengadaan Mesin Parut Kelapa Dan Penepung Beras	11 Kelompok	55 Unit

8	Pengadaan Mesin Pencacah Sampah Dan Mesin Press Sampah	1 Kelompok	2 Unit
Jumlah		91 Kelompok	901 Unit

Anggaran Pengadaan Peralatan Tahun 2021 Sebesar Rp. 2.245.196.000,-
terdiri dari :

No	Jenis Pengadaan	Jumlah Kelompok	Jumlah Unit
1	Pengadaan Alat Depot Air Minum	2 Kelompok	2 unit
2	Pengadaan Mesin Mixer Pembuat Roti	3 Kelompok	20 Unit
3	Pengadaan Mesin jahit	3 Kelompok	12 Unit
4	PengadaanMesin Obras	3 Kelompok	9 Unit
5	Pengadaan Mesin penggiling tepung ikan	1 Kelompok	1 Unit
6	Pengadaan Pertukangan	14 Kelompok	92 unit
7	Pengadaan Mesin Sentri Fugar	4 Kelompok	4 Unit
8	Pengadaan Mesin penggiling Mie	9 Kelompok	27 Unit
9	Pengadaan Mesin Pemeras kelapa	9 Kelompok	9 Unit
10	Pengadaan mesin gula Merah	4 Kelompok	4Unit
Jumlah		52 Kelompok	180 Unit

Identifikasi permasalahan pada pelaksanaan urusan wajib berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya pelaksanaan RAT
2. Adanya tunggakan penerima bantuan
3. Kegiatan usaha tidak berjalan
4. Belum optimalnya pengelolaan sentra produksi
5. Terbatasnya tenaga terampil

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, adalah dengan :



1. Merestrukturisasi Kelembagaan/Penataan sistem dan prosedur kinerja organisasi yang profesional
 2. Mengoptimalkan penagihan terhadap penerima bantuan yang menunggak
 3. Melakukan pendampingan untuk berjalannya kegiatan usaha koperasi
 4. Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengelola UKM secara swadaya
 5. Program penciptaan, penguatan dan fasilitasi UMKM yang produktif
- Data / Hal-hal lain yang dianggap perlu juga untuk dilaksanakan oleh

Pemerintah :

1. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi usaha kecil melalui penetapan peraturan perundang undangan dan kebijakan: pendanaan, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perijinan usaha dan perlindungan'
2. Melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil bersama-sama dunia usaha dan masyarakat terutama dalam bidang ; produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia dan tehnologi.
3. Menyediakan pembiayaan bagi pemberdayaan usaha kecil bersama-sama dunia usaha dan masyarakat, berupa :
kredit perbankan, pinjaaman lembaga keuangan bukan bank, modal, pinjaman dari penyisihan sebagian laba BUMN, hibah dan jenis pembiayaan lainnya.
4. Memfasilitasi kemitraan usaaha kecil dengan usaha menengah dan besar melalui pola; inti plasma, subkontrak, dagang umum waralaba, keaagenan dan bentuk-bentuk kemitraan lainnya.

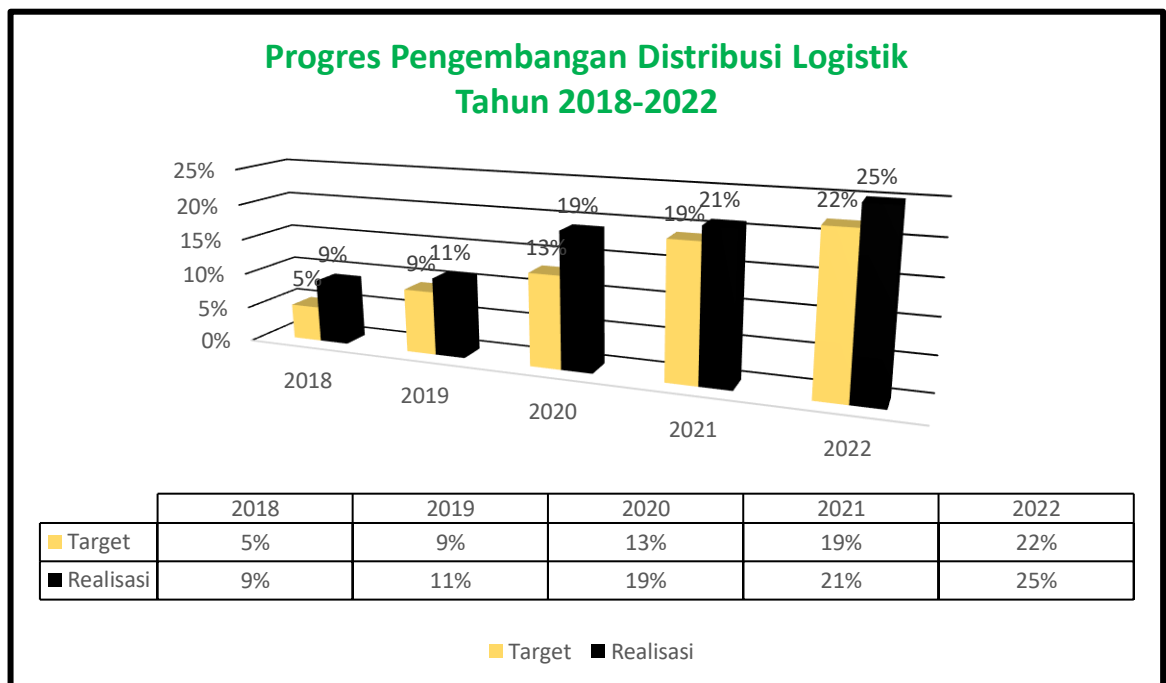
Urusan Pilihan yang dilaksanakan

Dalam aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan pilihan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sampai dengan tahun 2022 adalah :

Bidang Perindustrian

1. TERBANGUN DAN BERKEMBANGNYA KAWASAN DISTRIBUSI LOGISTIK (BARANG DAN JASA)

Secara umum progress berkembangnya kawasan distribusi logistik (barang dan jasa) dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



✓ Dukungan regulasi:

- Perda Kemudahan Investasi, Yakni Perda No.4 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentive dan Kemudahan Penanaman Modal, Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2019 tentang Tata cara pemberian insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- Perda RPIK Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2019-2039

- Perda RPIK Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi
- Perda No.5 Tahun 2012 tentang RT RW Kab. Kep. Selayar Tahun 2012-2032
- Perda No.3 Tahun 2022 tentang RT RW Provinsi Sul-Sel Tahun 2022-2041
- Master Plan kawasan industri Selayar
- Studi kelayakan (Feasibility study) Selayar
- ✓ Pemetaan Kawasan distribusi logistik sudah dibagi menjadi atas kawasan utama di pematata dan sub kawasan meliputi, kawasan pelabuhan Benteng, pelabuhan Jampea, pelabuhan Kayuadi, pelabuhan Bonerate dan Kalotoa.
- ✓ Penyusunan Dokumen Perencanaan kawasan sudah terlaksana dengan anggaran APBD Provinsi Tahun 2022 sebesar Rp. 1.500.000.000
- ✓ Dokumen Lahan:
 - Sudah ada pernyataan masyarakat pemilik lahan/bersertifikat atas nama Pemda dengan luas lahan 4 Ha yang lokasinya berada di Kawasan Utama Pamatata Kec. Bontomatene.
 - Lahan yang belum dibebaskan kepemilikannya seluas 1.200 Ha, lokasinya juga berada di Kawasan Utama Pamatata Kec. Bontomatene.
 - Dalam tahap perencanaan, seluas 2 Ha untuk masing-masing sub kawasan pelabuhan
- ✓ Minat investasi:
 - PT. Pelindo IV Makassar untuk modernisasi pelabuhan
 - PT. Pelayaran Tanto untuk pengangkutan kontener barang keluar masuk Selayar
- ✓ Langkah Koordinasi dengan:
 - Koordinasi dengan PT. Pelindo IV Makassar untuk pengaktifan kembali distribusi logistik kontainer di Kabupaten Kepulauan Selayar

- Koordinasi dengan PT. Pelayaran Tanto tentang rencana kedatangan di Kabupaten Kepulauan Selayar

Kemudian yang menjadi permasalahan pokok sebagai salah satu yang menghambat terwujudnya agenda dimaksud, yaitu terkendala adanya ketidaksesuaian harga lahan dengan penawaran yang diajukan saat dilakukan pembebasan dan keterbatasan anggaran pemerintah daerah.

Untuk pencapaian Sasaran IKU dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	2022		CAPAIAN (%)
		TARGET	REALISASI	
I.	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Sektor Perindustrian :			
	a. Pertumbuhan Sektor Industri	25 IKM	25 IKM	100
	b. Jumlah Peningkatan Unit usaha Industri Unggulan Daerah	51 IKM	51 IKM	100

- ✓ Jumlah Pelaku IKM sebanyak 1275 IKM
- ✓ Sentra Pengolahan Ikan berlokasi di Desa Padang Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri atas 1 kelompok binaan
- ✓ Tahun 2019 sentra pengolahan ikan telah mendapatkan bantuan DAK 1 M untuk pembelian peralatan
- ✓ Tahun 2022 sentra pengolahan ikan mendapat bantuan DAK FISIK sebesar 6,4 M dan telah selesai dibangun
- ✓ Tahun 2022 sebagai pendukung kegiatan sentra diberikan DAK Non Fisik sebesar 1,7 M (swakelola)
- ✓ Tahun 2022 sebagai penunjang kegiatan DAK Fisik, telah dianggarkan dana pembebasan lahan sebesar 350 juta dan telah terealisasi
- ✓ Pembentukan sentra pengolahan ikan tahun 2018-2019 Desa Bonto Sunggu Padang, Kecamatan Bontosikuyu





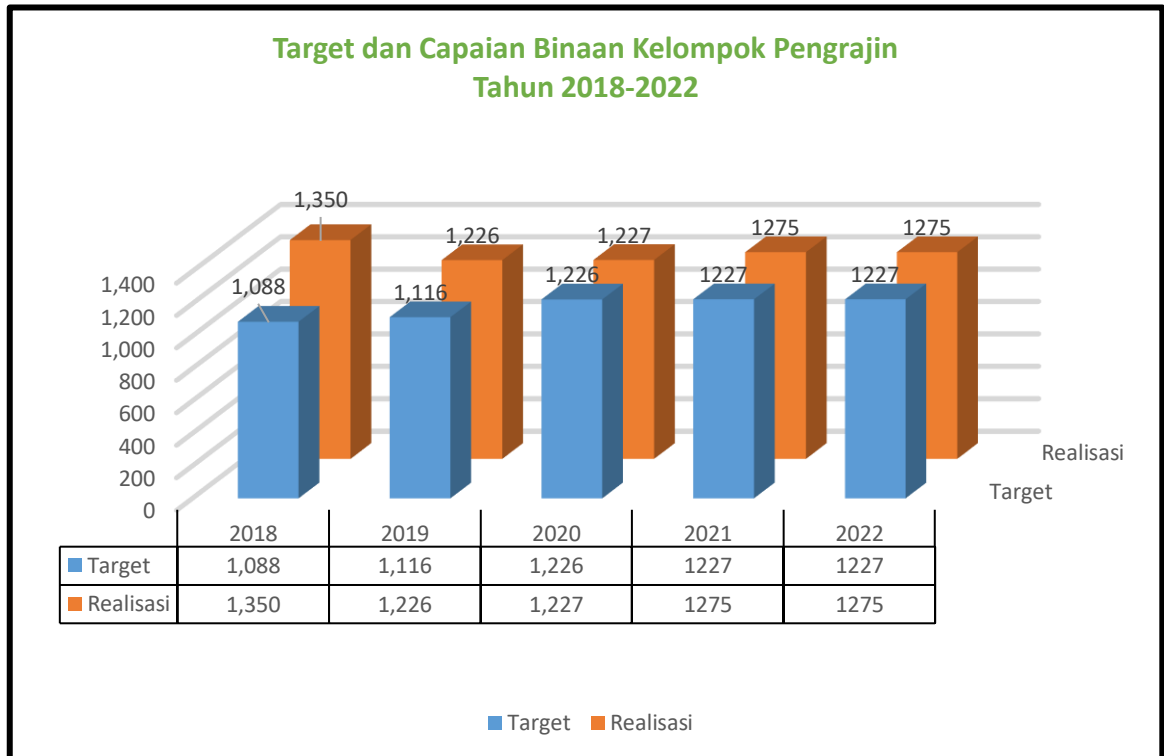
- ✓ Pembentukan sentra pandai besi tahun 2007 Desa Bungayya Bone lohe Kecamatan Bontomatene
- ✓ Pembentukan sentra pengembangan jambu mente Desa Bonto Jati Kec. Pasimasunggu Timur tahun 2021
- ✓ Pembentukan sentra gula merah di Desa Majapahit Kecamatan Pasimarannu tahun 2021
- ✓ Pembentukan sentra pengolahan pisang di Desa Lembang Matene Kecamatan Pasilambena Tahun 2022
- ✓ Pembentukan sentra pembuatan kapal rakyat di Desa Limantu Kecamatan Pasimarannu Tahun 2022
- ✓ Pembentukan sentra pengolahan ikan kering di Desa Kayuadi Kecamatan Takabonerate Tahun 2022
- ✓ Pembentukan sentra pengolahan jambu mente di Desa Massungke Kecamatan Pasimasunggu Tahun 2022
- ✓ Pembentukan galeri oleh oleh selayar kerjasama Lsm Econatural dan PASMO Pembinaan dan pelatihan secara konsisten terhadap pelaku industri mikro bidang pengolahan ikan, pengolahan turunan kelapa, legalitas usaha industri, kemasan dan labeling, dan lainnya sejak tahun 2016-2022

Beberapa kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- ✓ Belum optimalnya pengembangan sub kawasan distribusi logistik di Kepulauan dan pengembangan kawasan utama di Pamatata
- ✓ Masih terbatasnya ketersediaan SDM yang berkompeten
- ✓ Belum meratanya pengembangan sentra IKM di 11 kecamatan
- ✓ Belum optimalnya produksi hasil bumi, barang dan jasa sehingga distribusi logistik peti kemas melalui pelabuhan belum maksimal
- ✓ Belum optimalnya pemulihan ekonomi pasca covid 19 dan dampak inflasi

2. CAKUPAN BINA KELOMPOK PENGRAJIN/JUMLAH IKM

Gambaran umum progres capaian binaan kelompok pengrajin dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Adapun rencana yang akan dilakukan dalam meningkatkan penghasilan petani khusus pengrajin kopra, meliputi :

1. Membuat regulasi tentang tataniaga kelapa dan turunannya termasuk himbauan mengangkat kearifan lokal tentang pembuatan dan penggunaan minyak kelapa dalam kehidupan sehari-hari.
2. Pelatihan dan bantuan peralatan pembuatan arang tampurung.
3. Pelatihan dan bantuan peralatan pembuatan carbon aktif.
4. Pelatihan dan peralatan pembuatan vco curah.
5. Sosialisasi pentingnya menumbuhkembangkan kearifan lokal daerah tentang pembuatan minyak goreng dari kelapa dalam serta himbauan melalui surat edaran untuk penggunaannya secara massal oleh masyarakat.



Analisa capaian kinerja yang dipaparkan di bawah ini adalah kegiatan yang berjalan pada tahun 2022, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp.776.331.000,- dan terealisasi sebesar Rp.744.002.200,- dengan capaian output 95,84 %. Ini Dapat dijelaskan bahwa program ini berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai. Selanjutnya diuraikan beberapa kegiatannya sebagai berikut :

a. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.229.131.000,- terealisasi sebesar Rp.223.231.000,- dengan capaian output 97,43%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini dianggap mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

b. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.165.000.000,- terealisasi sebesar Rp.150.552.600,- dengan capaian output 91,24%. Dapat dijelaskan bahwa kegiatan ini dianggap mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

c. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.5.400.000,- terealisasi sebesar Rp.5.220.000,- dengan capaian output 96,67%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ini dianggap mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

d. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat



Dari dana yang disediakan sebesar Rp.46.800.000,- terealisasi sebesar Rp.45.267.800,- dengan capaian output 96,73%. Dapat dijelaskan bahwa kegiatan ini dianggap mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

e. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.330.000.000,- terealisasi sebesar Rp.319.730.800,- dengan capaian output 96,89%. Dapat dijelaskan bahwa kegiatan ini dianggap mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

2. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp.8.129.742.125,- dan terealisasi sebesar Rp.7.627.629.034,- dengan capaian output 93,82%. Ini Dapat dijelaskan bahwa program ini berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai. Selanjutnya diuraikan beberapa kegiatannya sebagai berikut :

a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.1.720.161.000,- terealisasi sebesar Rp.1.637.858.200,- dengan capaian output 95,22%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini dianggap mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

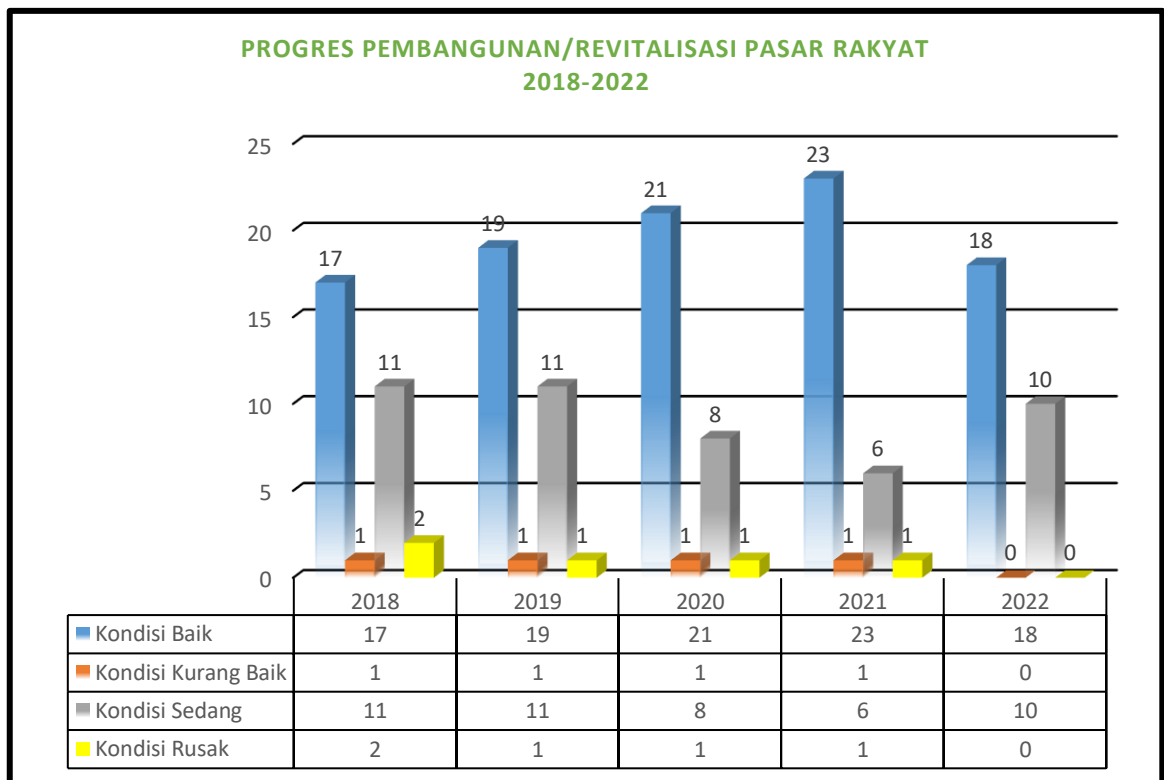
Dari dana yang disediakan sebesar Rp.6.409.581.125,- terealisasi sebesar 5.989.770.834,- dengan capaian output 93,45%. Dapat dijelaskan bahwa kegiatan ini dianggap mencapai target atau sasaran yang diinginkan.



Bidang Perdagangan

Secara garis besar jumlah pasar yang sudah dibangun di Kabupaten Kepulauan Selat Rata, dapat dilihat pada tabel berikut :

1. MENINGKATNYA JUMLAH PASAR



Pada tahun 2022, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, khususnya Bidang Perdagangan terus melakukan berbagai program secara berkesinambungan terus dijalankan.

Dan sebagai apresiasi dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yaitu dengan diterimanya Tugas Pembantuan pada pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan, dengan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat di tujuh kecamatan.

Dana APBN untuk tahun 2018-2022, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah mendapatkan Tugas Pembantuan Pasar Rakyat sebanyak 10 (delapan) pasar di 9 kecamatan yakni tahun 2022 diamanahkan 2 dana Tugas Pembantuan di 2 (dua) kecamatan, yakni :

- ✓ Pasar Rakyat Pasimasunggu Timur di Pasimasunggu Timur dengan anggaran sebesar Rp. 2.800.910.000,-.

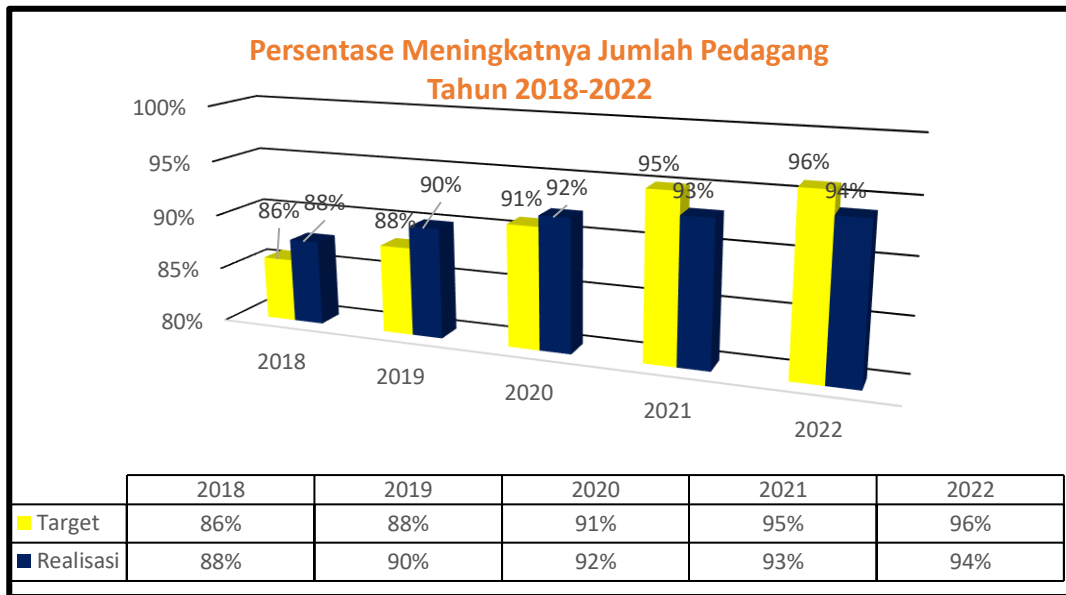


- ✓ Pasar Rakyat Pasimarannu di Kecamatan Pasimarannu dengan anggaran sebesar Rp. 2.801.100.000,-.



Pada tahun ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berhasil menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pasar dari tahun sebelumnya sebesar Rp.130.000.000 menjadi Rp.174.392.450 dengan kenaikan sebesar 34,15%. Selain itu juga, penyaluran dana bantuan dampak inflasi daerah kepada pelaku UMKM berhasil disalurkan sebesar Rp.2.343.200.000 kepada 2133 pelaku IKM/UMKM dengan capaian realisasi sebesar 80,66%.

2. PERSENTASE MENINGKATNYA JUMLAH PEDAGANG



Jumlah pedagang terus meningkat setiap tahun seiring dengan bertambahnya sarana dan prasarana distribusi barang di Kabupaten Kepulauan Selayar, jumlah pedagang sampai 31 Desember 2022 sebanyak ± 2.557 orang dari 28 pasar (jumlah pedagang berubah ubah seiring dengan waktu tertentu, seperti hari hari besar, terkadang jumlah pedagang bermunculan dari berbagai kalangan dan melebihi dari jumlah pedagang yang terdaftar).

Untuk pencapaian Sasaran IKU ke-2 dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	2022		CAPAIAN (%)
		TARGET	REALISASI	
II.	Meningkatnya Skala Usaha Sektor Perdagangan :			
	a. Persentase Pasar Rakyat dalam kondisi baik	85%	85%	100%
	b. Jumlah rekomendasi izin usaha yang diterbitkan	1000	1232	123,2%



Analisa capaian kinerja yang dipaparkan di bawah ini adalah kegiatan yang berjalan atau kegiatan yang berhasil dilaksanakan pada tahun 2022, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp. 73.327.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 72.022.250,- dengan capaian output 98,22%. Ini dapat dijelaskan bahwa program ini berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun kegiatannya adalah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan dana yang disediakan sebesar Rp. 73.327.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 72.022.250,- dengan capaian output 98,22%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini dianggap mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

2. Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp.50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.49.830.000,- dengan capaian output 99,66%. Adapun kegiatannya adalah Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dengan dana yang disediakan sebesar Rp.50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.49.830.000,- dengan capaian output 99,66%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai.

3. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp. 37.290.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 37.290.000,- dengan capaian output 100%. Ini dapat dijelaskan bahwa program ini berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun kegiatannya adalah Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang



Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat dengan dana yang disediakan sebesar Rp. 37.290.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 37.290.000,- dengan capaian output 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini dianggap mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

4. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp.272.070.000,- dan terealisasi sebesar Rp.271.422.200,- dengan capaian output 99,76%. Ini dapat dijelaskan bahwa program ini berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai. Selanjutnya diuraikan beberapa kegiatannya sebagai berikut :

a. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.102.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.101.534.000,- dengan capaian output 99,54%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai.

b. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.50.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp.50.018.200,- dengan capaian output 99,64%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai.

c. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.119.870.000,- dan terealisasi sebesar Rp.119.870.000,- dengan capaian output 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai.

5. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp.102.760.000,- dan terealisasi sebesar Rp.102.672.902,- dengan capaian output 99,92%. Adapun kegiatannya adalah Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan dengan dana yang disediakan sebesar Rp.102.760.000,- dan terealisasi sebesar Rp.102.672.902,- dengan capaian output 99,92%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini dianggap mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

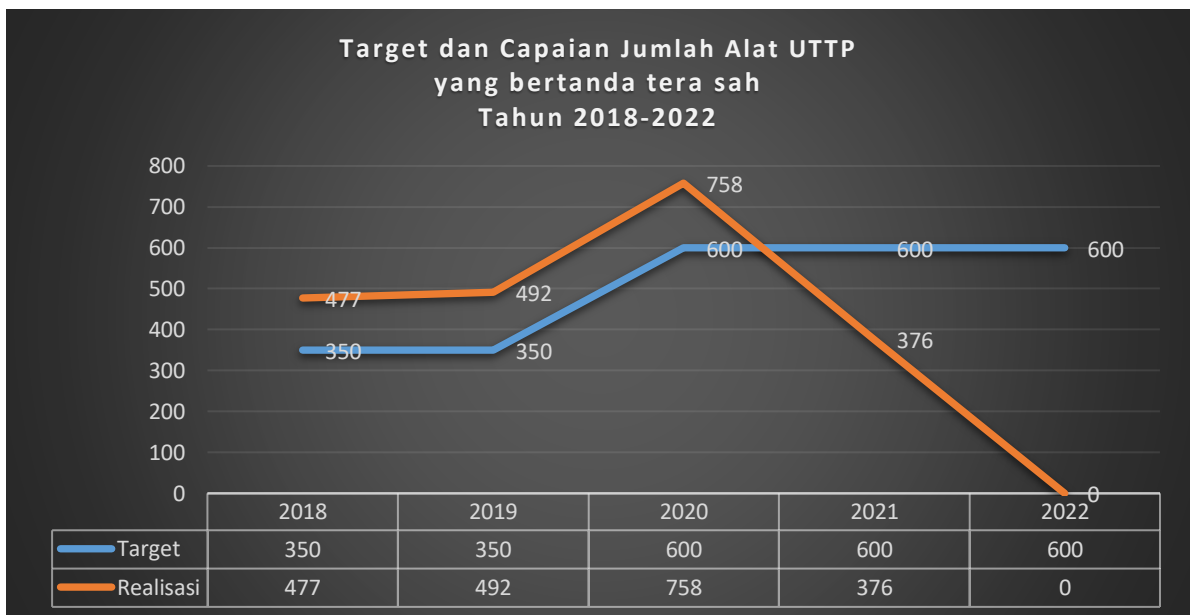
6. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp.23.940.000,- dan terealisasi sebesar Rp.23.599.200,- dengan capaian output 98,58%. Ini dapat dijelaskan bahwa program ini berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun kegiatannya adalah Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan dengan dana yang disediakan sebesar Rp.23.940.000,- dan terealisasi sebesar Rp.23.599.200,- dengan capaian output 98,58%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai.



Secara garis besar pencapaian program dan kegiatan kemetrolgian berupa Tera dan Tera Ulang tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

MENINGKATNYA JUMLAH ALAT UTTP YANG BERTANDA TERA SAH



Untuk pencapaian Sasaran ke-5 dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :



NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	2022		CAPAIAN (%)
		TARGET	REALISASI	
	Meningkatnya penguatan kinerja pengujian dan sertifikasi mutu barang, kemetrolgion serta pengawasan barang dan jasa beredar			
	a. Persentasi UTTP yang bertanda tera sah	600 UTTP	0 UTTP	0%

Untuk terciptanya pasar tertib ukur dan terlindunginya konsumen dan pelaku usaha dari kerugian, program/kegiatan pada Bidang Kemetrolgion antara lain:

1. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
2. Program peningkatan sarana dan prasarana kemetrolgion
3. Program pengendalian kemetrolgion

Dengan capaian kinerja ketiga program ini adalah tersedianya alat standar metrologi legal dan kendaraan operasional dan hasil yang ingin dicapai dalam program ini adalah dengan adanya alat UTTP pengawasan secara berkala dapat meminimalisir kekurangan takaran/ukuran yang dapat merugikan konsumen, disamping itu PAD dapat dimaksimalkan karena sudah bisa melakukan tera/tera ulang tanpa bergantung pada BSML.

Analisa capaian kinerja yang dipaparkan di bawah ini adalah kegiatan yang berjalan atau kegiatan yang berhasil dilaksanakan pada tahun 2022, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp.123.581.500,- dan terealisasi sebesar Rp.113.565.400,- dengan capaian output 91,90%. Ini Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan berjalan dengan baik sesuai target



dan sasaran yang ingin dicapai. Selanjutnya diuraikan beberapa kegiatannya sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.25.968.500,- terealisasi sebesar Rp.24.620.400,- dengan capaian output 94,81%. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

b. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.97.613.000,- terealisasi sebesar Rp.88.945.000,- dengan capaian output 91,12%. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.



Daftar Rincian Alat UTP yang ditera/tera ulang

No.	Jenis Alat UTP	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Takaran Kering	179	199	90	67
2	Timbangan Pegas	135	179	98	136
3	Timbangan Sentisimal	21	14	12	9
4	Meter Kayu	3	6	2	1
5	Timbangan Elektronik	7	9	8	8
6	Dacin Logam	15	17	9	3
7	Miligram	-	-	-	-
8	Anak Timbangan	81	15	25	32
9	Neraca Emas	10	9	3	-
10	Timbangan Bobot Ingsut	-	1	1	1
11	SPBU	17	8	15	-
12	Timbangan Meja	1	3	1	-
13	Timbangan Pegas Cepat	-	-	1	-
14	AMP	-	1	1	-
15	Timbangan Digital	-	-	1	-
16	Timbangan Elektronik Emas	-	-	1	-
Jumlah Alat		469	461	268	257
Jumlah Retribusi			Rp.10.404.000	Rp.7.747.000	Rp.3.941.000

Beberapa faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pencapaian sasaran kinerja tahun 2022, adalah sebagai berikut :

1. Peredaran barang/produk dan jasa yang tidak layak pakai, seperti: barang/produk yang sudah kadaluarsa, kemasan dalam keadaan rusak dan lain-lain.
2. Belum optimalnya penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) oleh pelaku usaha.
3. Adanya kesalahan penyataan jabatan pengawas kedalam jabatan fungsional penera sehingga pada Tahun 2022 tidak tersedia tenaga fungsional penera yang menjadi persyaratan penerbitan tanda tera sah.

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan kedepan, antara lain :



1. Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran barang/produk yang tidak layak jual dengan memberikan sanksi.
2. Melakukan fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana untuk pasar tradisional dalam membantu meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha maupun peningkatan PAD.
3. Pembaharuan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) melalui kalibrasi secara berkala dan pengadaan alat yang baru.
4. Segera mengusulkan pengangkatan pejabat fungsional penera yang akan menangani program kegiatan kemetrolagian sehingga tanda tera sah dapat diterbitkan.

Kesekretariatan

Analisa capaian kinerja yang dipaparkan di bawah ini adalah kegiatan yang berjalan atau kegiatan yang berhasil dilaksanakan pada tahun 2022, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp.48.762.000,- dan terealisasi sebesar Rp.48.202.000,- dengan capaian output 98,85%. Ini Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai. Selanjutnya diuraikan beberapa kegiatannya sebagai berikut :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.12.020.000,- terealisasi sebesar Rp.11.710.000,- dengan capaian output 97,42%. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.3.942.000,- terealisasi sebesar Rp.3.942.000,- dengan capaian output 100%. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.7.460.000,- terealisasi sebesar Rp.7.460.000,- dengan capaian output 100 %. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.1.704.000,- terealisasi sebesar Rp.1.704.000,- dengan capaian output 100 %. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.7.382.000,- terealisasi sebesar Rp.7.282.000,- dengan capaian output 98,65%. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.8.443.000,- terealisasi sebesar Rp.8.393.000,- dengan capaian output 99,41%. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.7.811.000,- terealisasi sebesar Rp.7.711.000,- dengan capaian output 98,72%. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp.2.880.932.658,- dan terealisasi sebesar Rp.2.822.333.888,- dengan capaian output 97,96%. Ini Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan berjalan dengan baik sesuai target

dan sasaran yang ingin dicapai. Selanjutnya diuraikan beberapa kegiatannya sebagai berikut :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.2.865.932.658,- terealisasi sebesar Rp.2.807.333.888,- dengan capaian output 97,96%. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 5.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,- dengan capaian output 100 %. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 5.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,- dengan capaian output 100 %. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

d. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 5.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,- dengan capaian output 100 %. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp.10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.10.000.000,- dengan capaian output 100 %. Ini dapat dijelaskan bahwa program ini berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun kegiatannya adalah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan dana yang disediakan sebesar Rp. 10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,- dengan capaian output 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini dianggap mencapai target atau sasaran yang diinginkan.



4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp.5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.5.000.000,- dengan capaian output 100%. Ini dapat dijelaskan bahwa program ini berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun kegiatannya adalah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan dana yang disediakan sebesar Rp.5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.5.000.000,- dengan capaian output 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini dianggap mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp.867.288.600,- dan terealisasi sebesar Rp.866.799.200,- dengan capaian output 99,94%. Ini Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai. Selanjutnya diuraikan beberapa kegiatannya sebagai berikut :

a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.266.960.600,- terealisasi sebesar Rp.266.960.000,- dengan capaian output 100%. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 133.431.000,- terealisasi sebesar Rp.133.372.200,- dengan capaian output 99,96%. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.10.000.000,- terealisasi sebesar Rp.9.570.000,- dengan capaian output 95,7%. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

d. Fasilitasi Kunjungan Tamu



Dari dana yang disediakan sebesar Rp.36.120.000,- terealisasi sebesar Rp.36.120.000,- dengan capaian output 100%. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.420.777.000,- terealisasi sebesar Rp.420.777.000,- dengan capaian output 100%. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp.734.372.150,- dan terealisasi sebesar Rp.682.262.900,- dengan capaian output 92,90%. Ini Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai. Selanjutnya diuraikan beberapa kegiatannya sebagai berikut :

a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.26.664.400,- terealisasi sebesar Rp.26.664.400,- dengan capaian output 100%. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

b. Pengadaan Mebel

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.25.530.000,- terealisasi sebesar Rp.25.530.000,- dengan capaian output 100 %. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.266.328.500,- terealisasi sebesar Rp.266.328.500,- dengan capaian output 100 %. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

d. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



Dari dana yang disediakan sebesar Rp.166.789.250,- terealisasi sebesar Rp.148.766.000,- dengan capaian output 89,19%. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

- e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.249.060.000,- terealisasi sebesar Rp.214.974.000,- dengan capaian output 86,31%. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp.646.575.342,- dan terealisasi sebesar Rp.638.552.946,-. Selanjutnya diuraikan beberapa kegiatannya sebagai berikut :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.5.330.000,- terealisasi sebesar Rp.5.330.000,- dengan capaian output 100%.

- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.163.830.542,- terealisasi sebesar Rp.161.502.546,- dengan capaian output 98,58%. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.477.414.800,- terealisasi sebesar Rp.471.720.400,- dengan capaian output 98,81%. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp.309.877.000,- dan terealisasi sebesar Rp.309.274.500,- dengan capaian output 99,80%. Ini dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan berjalan dengan baik sesuai target





dan sasaran yang ingin dicapai. Selanjutnya diuraikan beberapa kegiatannya sebagai berikut :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasi atau Kendaraan Dinas Jabatan
Dari dana yang disediakan sebesar Rp.97.560.000,- terealisasi sebesar Rp.97.086.000,- dengan capaian output 99,51%. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Dari dana yang disediakan sebesar Rp.24.010.000,- terealisasi sebesar Rp.24.010.000,- dengan capaian output 100%. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Dari dana yang disediakan sebesar Rp.81.700.000,- terealisasi sebesar Rp.81.700.000,- dengan capaian output 100%. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Dari dana yang disediakan sebesar Rp.80.845.000,- terealisasi sebesar Rp.80.845.000,- dengan capaian output 100%. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

Secara umum anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar berasal dari tiga sumber yaitu APBD Kabupaten Kepulauan Selayar, APBD Propinsi Sulawesi Selatan dan APBN melalui dana dekonsentrasi Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM.

Selain itu pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan

Selayar memberikan kontribusi pendapatan dibidang Perdagangan dan bidang kemertologian melalui retribusi pasar dan layanan tera/tera ulang.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

No	Sumber	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Reribusi Pelayanan Pasar	500.000.000	174.392.450	34,87
2.	Layanan Tera/Tera Ulang	25.968.500	24.620.400	94,80
	Jumlah	525.968.500	199.012.850	37,83

2. Belanja dan Realisasi

Berikut Rencana dan Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar :

Uraian Belaja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	%
- Belanja Operasi	12.996.781.600	12.696.048.570	300.733.030	97,69
- Belanja Modal	7.051.753.275	6.984.025.700	67.727.575	99,04
Surplus/(defisit)	20.048.534.875	19.680.074.270	368.460.605	98,16

Dari kedua tabel di atas dapat dijelaskan bahwa surplus/(defisit) anggaran sebesar Rp. 20.048.534.875,- terealisasi sebesar Rp. 19.680.074.270,- atau 98,16%.

Penjabaran pengukuran kinerja dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

No	Nama Program dan Kegiatan	Indikator	Pagu	Realisasi	%
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang berkembang	Rp.776.331.000,00	Rp.744.002.200,00	95,84

		modal usaha dan tenaga kerja			
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Pembentukan Sentra IKM	Rp.229.131.000,00	Rp.223.231.000,00	97,43
	Koordinasi Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	Rp.165.000.000,00	Rp.150.552.600,00	91,24
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Pelatihan Pengolahan Industri dan Pemantauan Hasil Pelaksanaan Pelatihan	Rp. 5.400.000,00	Rp.5.220.000,00	96,67
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Studi kawasan IKM kerajinan dan kajian ekonomi pembangunan distribusi logistik teluk bone	Rp.46.800.000,00	Rp.45.267.800,00	96,73
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	pameran Industri kreatif, deskranasda, hari jadi sulses dan pameran industri	Rp.330.000.000,00	Rp.319.730.800,00	96,89
2	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Persentase izin usaha yang dikeluarkan	Rp.8.129.742.125,00	Rp.7.627.629.034,00	93,82
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Persentase Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Izin usaha Industri	Rp.1.720.161.000,00	Rp.1.637.858.200,00	95,22

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Kunker ke Dinas Perindustrian Takalar/Jeneponto	Rp.6.409.581.125,00	Rp.5.989.770.834,00	93,45
3	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase peningkatan penerbitan izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Rp.20.405.500,00	Rp.17.137.500,00	83,98
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Penerbitan Surat Rekomendasi Perizinan	Rp.20.405.500,00	Rp.17.137.500,00	83,98
4	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan ketersediaan sarana prasarana perdagangan dan pengelolaannya	Rp.73.327.000,00	Rp.72.022.250,00	98,22
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pemanfaatan Fasilitas Tol Laut oleh Consignee dan Pelaku Usaha	Rp.73.327.000,00	Rp.72.022.250,00	98,22
5	Pembinaan terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase peningkatan pembinaan terhadap pengelola pasar rakyat di Kabupaten Kepulauan Selayar	Rp.50.000.000,00	Rp.49.830.000,00	99,66
	Pembinaan dan pengendalian pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pengelola pasar rakyat yang dibina dan dikendalikan	Rp.50.000.000,00	Rp.49.830.000,00	99,66
6	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya	Rp.37.290.000,00	Rp.37.290.000,00	100

	Koordinasi dan Sikronisasi Peningkatan Akseibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Terlaksananya Koordinasi dan Sikronisasi Peningkatan Akseibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Rp.37.290.000,00	Rp.37.290.000,00	100
7	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp.272.070.000,00	Rp.271.422.200,00	99,76
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengendalian harga barang dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	Rp.102.000.000,00	Rp.101.534.000,00	99,54
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Jumlah barang yang dipantau dan terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Rp.50.200.000,00	Rp.50.018.200,00	99,64
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Rp.119.870.000,00	Rp.119.870.000,00	100
8	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan usaha produk ekspor unggulan Kabupaten Kepulauan Selayar	Rp.102.760.000,00	Rp.102.672.902,00	99,92
	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Berpartisipasi dalam Pameran Produk Ekspor Unggulan	Rp.102.760.000,00	Rp.102.672.902,00	99,92
9	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Alat UTP yang Bertanda Tera Sah yang Berlaku	Rp.123.581.500,00	Rp.113.565.400,00	91,90
	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	Alat UTP bertanda tera	Rp.25.968.500,00	Rp.24.620.400,00	94,81

		sah yang berlaku			
	Pengawasan/penyuluhan metrologi legal	Alat UTP yang layak pakai dan BDKT yang baik	Rp.97.613.000,00	Rp.88.945.000,00	91,12
10	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan promosi dan penggunaan produk dalam negeri	Rp.23.940.000,00	Rp.23.599.200,00	98,58
	Peningkatan Sistem dan jaringan informasi perdagangan	Update Data dan Informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting Lainnya Melalui Sistem Informasi Perdagangan	Rp.23.940.000,00	Rp.23.599.200,00	98,58
11	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Aktif	Rp.48.578.000,00	Rp.48.413.000,00	99,66
	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Berkualifikasi Sehat	Rp.48.578.000,00	Rp.48.413.000,00	99,66
12	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang ber-RAT	Rp.163.640.000,00	Rp.163.640.000,00	100
	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Persentase koperasi yang ber-RAT	Rp.163.640.000,00	Rp.163.640.000,00	100
13	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, kemudahan Perizinan, Penguatan kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Peningkatan Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Pembangunan Daerah	Rp.553.147.000,00	Rp.550.074.000,00	99,44
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah kegiatan yang terverifikasi sebagai pelaku usaha	Rp.79.400.000,00	Rp.79.344.000,00	99,93

	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan	Rp.203.074.000,00	Rp.202.677.200,00	99,80
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan usaha Mikro	Jumlah Sentra yang dikembangkan	Rp.237.160.000,00	Rp.234.560.000,00	98,90
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Pelaku yang Ikut Latihan	Rp.33.513.000,00	Rp.33.492.800,00	99,94
14	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Unggul dan Kompetitif	Rp.4.170.915.000	Rp.3.428.412.500,00	82,20
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah kelompok UMKM Penerima Bantuan	Rp.4.170.915.000	Rp.3.428.412.500,00	82,20
15	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun (%)	Rp.48.762.000,00	Rp.48.202.000,00	98,85
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan (Renstra/Renja/RKT)	Rp.12.020.000,00	Rp.11.710.000,00	97,42
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Rp.3.942.000,00	Rp.3.942.000,00	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P)	Rp.7.460.000,00	Rp.7.460.000,00	100
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Rp.1.704.000,00	Rp.1.704.000,00	100
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)	Rp.7.382.000,00	Rp.7.282.000,00	98,65
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Kinerja	Rp.8.443.000,00	Rp.8.393.000,00	99,41

	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(Lakip/LKPJ/LPPD)			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SAKIP dan Implementasi RB (Cascading, PK, IKU, IKI, Rencana Aksi, Monev PK)	Rp.7.811.000,00	Rp.7.711.000,00	98,72
16	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kelengkapan Administrasi Keuangan dan Pelaporan	Rp.2.880.932.658,00	Rp.2.822.333.888,00	97,97
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangan	Rp.2.865.932.658,00	Rp.2.807.333.888,00	97,96
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Rp.5.000.000,00	Rp.5.000.000,00	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah SPJ Fungsional	Rp.5.000.000,00	Rp.5.000.000,00	100
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan RF-K	Rp.5.000.000,00	Rp.5.000.000,00	100
17	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Administrasi BMD yang Tersusun	Rp.10.000.000,00	Rp.10.000.000,00	100
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD	Rp.10.000.000,00	Rp.10.000.000,00	100
18	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kelancaran Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.5.000.000,00	Rp.5.000.000,00	100
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase peningkatan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Rp.5.000.000,00	Rp.5.000.000,00	100
19	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelancaran Administasi Perkantoran	Rp.867.288.600,00	Rp.866.799.200,00	99,94
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peningkatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.266.960.600,00	Rp.266.960.000,00	100

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase peningkatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.133.431.000,00	Rp.133.372.200,00	99,96
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase peningkatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.10.000.000,00	Rp.9.570.000,00	95,7
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase peningkatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp.36.120.000,00	Rp.36.120.000,00	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase peningkatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.420.777.000,00	Rp.420.777.000,00	100
20	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peralatan dan Kelengkapan Penunjang Administrasi Daerah	Rp.734.372.150,00	Rp.682.262.900,00	92,90
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase peningkatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.26.664.400,00	Rp.26.664.400,00	100
	Pengadaan Mebel	Persentase Peningkatan Jumlah Mebeleur yang disediakan	Rp.25.530.000,00	Rp.25.530.000,00	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang disediakan	Rp.266.328.500,00	Rp.266.328.500,00	100
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan halaman yang dibangun	Rp.166.789.250,00	Rp.148.766.000,00	89,19
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Peningkatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.249.060.000,00	Rp.214.974.000,00	86,31
21	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelancaran Administrasi dan Penunjang	Rp.646.575.342,00	Rp.638.552.946,00	98,76

		Operasional Perkantoran			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelayanan administrasi perkantoran yang baik	Rp.5.330.000,00	Rp.5.330.000,00	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelayanan administrasi perkantoran yang baik	Rp.163.830.542,00	Rp.161.502.546,00	98,58
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase peningkatan pelayanan umum kantor	Rp.477.414.8'00,00	Rp.471.720.400,00	98,81
22	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kelancaran Administrasi Barang Milik Daerah	Rp.309.877.000,00	Rp.309.274.500,00	99,80
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase peningkatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.97.560.000,00	Rp.97.086.000,00	99,51
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peningkatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.24.010.000,00	Rp.24.010.000,00	100
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase peningkatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp.25.762.000,00	Rp.25.633.500,00	99,50
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase peningkatan Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.81.700.000,00	Rp.81.700.000,00	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase peningkatan Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.80.845.000,00	Rp.80.845.000,00	100

Implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- 1) Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- 2) Terjaganya Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Terselenggaranya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 4) Meningkatnya keberdayaan masyarakat menjadi pelaku usaha
- 5) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti berbagai pelatihan/bimtek pengelolaan usaha home industri

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu juga untuk dilaksanakan oleh Pemerintah dalam untuk mengatasi faktor-faktor penyebab yang timbul

Bidang Koperasi dan UKM

1. Melakukan penyuluhan, pembinaan dan pelatihan kepada Koperasi yang kondisinya sudah tidak sehat
2. Mencari peluang anggaran pembinaan baik ke APBD Provinsi maupun APBN
3. Meningkatkan akses pelaku usaha Koperasi dan UMKM terhadap layanan perbankan.
4. Merestrukturisasi Kelembagaan/Penataan system dan prosedur kinerja organisasi yang professional
5. Mengoptimalkan penagihan terhadap penerima bantuan yang menunggak
6. Melakukan pendampingan untuk berjalannya kegiatan usaha koperasi
7. Melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil bersama-sama dunia usaha dan masyarakat terutama dalam bidang; produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia dan tehnologi.



8. Menyediakan pembiayaan bagi pemberdayaan usaha kecil bersama-sama dunia usaha dan masyarakat, berupa : kredit perbankan, pinjaman lembaga keuangan bukan bank, modal, pinjaman dari penyisihan sebagian laba BUMN, hibah dan jenis pembiayaan lainnya.
9. Memfasilitasi kemitraan usaha kecil dengan usaha menengah dan besar melalui pola; inti plasma, subkontrak, dagang umum waralaba, keagenan dan bentuk-bentuk kemitraan lainnya.
10. Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengelola UKM secara swadaya
11. Program penciptaan, penguatan dan fasilitasi UMKM yang produktif
12. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi usaha kecil melalui penetapan peraturan perundang undangan dan kebijakan: pendanaan, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perijinan usaha dan perlindungan.

Bidang Perindustrian

1. Memfasilitasi percepatan penumbuhan kawasan industri
2. Memfasilitasi akses permodalan bagi wira usaha baru dan IKM unggulan dengan melakukan kerjasama dengan perbankan daerah/nasional, BUMN, BUMD dan instansi terkait permodalan usaha.
3. Melakukan pendampingan manajemen kewirausahaan bagi calon wirausaha baru agar dapat memiliki mental yang tanggung dalam memulai usaha.
4. Melakukan pemutakhiran data perkembangan sektor industri melalui pendekatan penggunaan teknologi informasi sehingga dapat menyajikan data secara real time dan valid sesuai dengan kebutuhan informasi data.
5. Melatih petugas pendataan industri yang disiapkan untuk kabupaten/kota serta memaksimalkan fungsi penyuluh industri dalam melakukan



pendampingan kepada sentra-sentra yang vacum atau berhenti untuk difasilitasi jalan keluar dari kelangsungan produksi dan usaha IKM baik dalam bentuk modal maupun peralatan.

Bidang Perdagangan

1. Melakukan percepatan pengembangan kawasan distribusi logistik di kawasan timur Indonesia khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Melakukan pembinaan di aspek inovasi dan diversifikasi produk agar mendorong IKM/UKM yang kalah bersaing untuk dan berkembang dengan inovasi produk yang baru dan sesuai dengan selera pasar.
3. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi usaha kecil melalui penetapan peraturan perundang undangan dan kebijakan: prasarana, informasi, kemitraan, dan perijinan usaha.
4. Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran barang/produk yang tidak layak jual dengan memberikan sanksi.
5. Melakukan fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana untuk pasar tradisional dalam membantu meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha maupun peningkatan PAD.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA dan Pencapaian RENSTRA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah s/d Tahun 2021 Kabupaten Kepulauan Selayar diuraikan dalam tabel T-C.29

4.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Peran dan posisi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar sangat penting dan strategis khususnya dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah menuju kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan, koordinasi,





dan sinergi program dengan Pemerintah Daerah dalam Lingkup Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar perlu ditingkatkan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dibutuhkan sumber daya manusia yang semakin berperan aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai fasilitator dan motivator bagi masyarakat.

Selain itu dukungan dana yang proporsional dan memadai sangat dibutuhkan untuk optimalisasi dan peningkatan kinerja pelayanan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. Kepastian regulasi dan aspek hukum baik dalam ranah kebijakan maupun operasional teknis juga sangat diperlukan agar pelaksanaan kinerja tidak terkendala. Pada ranah kebijakan, perumusan integrasi pembinaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan inovasi upaya strategis mewujudkan tupoksi dengan lebih terukur dan sinergis.

Kebijakan ini diharapkan mampu mengakselerasi upaya pencapaian visi misi kepala daerah sesuai dengan tupoksi Pemerintah Daerah. Dalam kurun waktu lima tahun ke depan masih banyak permasalahan dan hambatan lain yang akan dihadapi oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar. Perlu digaris bawahi pula berkaitan dengan kondisi riil pelaku usaha bahwa kualitas SDM pelaku usaha bidang perindustrian, perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah masih terbatas. Kebanyakan pelaku usaha tersebut berpendidikan rendah dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan, dan manajemen yang seadanya sehingga pengelolaan usaha baik dari sisi manajemen, teknis produksi, dan pemasaran pun masih lemah.

Dengan melihat kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan yang masih lemah dalam menghadapi tantangan khususnya dalam upaya mewujudkan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati 2021-2026 antara lain:



1. Belum optimalnya pengembangan sub kawasan distribusi logistik di Kepulauan dan pengembangan kawasan utama di Pamatata
2. Tahun 2022 akan dibangun sentra pengolahan ikan di Desa Padang Kecamatan Bontosikuyu
3. Perlunya peningkatan kualitas sentra kerajinan dengan cara memanfaatkan sarana dan prasarana pusat layanan usaha terpadu (PLUT)
4. Masih terbatasnya ketersediaan SDM Kompetensi
5. Belum meratanya pengembangan sentra IKM di 11 Kecamatan
6. Belum optimalnya pemulihan ekonomi pasca covid 19 dan dampak inflasi

Beberapa isu penting yang dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar sampai pada akhir Pembangunan Jangka Menengah (PJM) yaitu tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut

1. Pengembangan ekonomi lokal dengan optimalisasi segenap potensi;
2. Pengembangan UKM dengan optimalisasi pemberdayaan sentra UKM dan produk unggulan daerah;
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku usaha UMKM dan, perdagangan;
4. Peningkatan penggunaan produk daerah untuk mendorong pengembangan UMKM lokal;
5. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan mendorong peningkatan kualitas dan perluasan pasar;
6. Peningkatan perlindungan konsumen dan peningkatan kemetrolgian daerah;
7. Peningkatan koordinasi dan sinergisitas program/kegiatan dan pendanaan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;



8. Peningkatan inovasi daerah serta integrasi pembinaan perdagangan, koperasi dan UMKM;
9. Optimalisasi pendapatan dengan upaya intensifikasi pendapatan.

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun / Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke forum Musrenbangdes.
2. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu - isu penting dari masing – masing SKPD yang dibawa ke Forum Organisasi Perangkat Daerah.

Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar disusun berdasarkan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia. Selain itu, program kegiatan juga disusun dengan memperhatikan usulan dari masyarakat hasil Musrenbang Kecamatan, maka berbagai aspirasi yang ada dapat terserap demi penyempurnaan Renja yang diharapkan akan memberikan output seperti yang diharapkan semua pihak.

Penelaahan Usulan Masyarakat Hasil Musreimbang Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Volume	Sumber Dana		Lokasi	Pengusul
			APBN	APBD KAB		
1	2	3	4	5	6	7

1	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil					
	<i>Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi</i>					
	- Bantuan parut kelapa gandang	50 Buah		√	Desa Tanamalala	Kecamatan Pasimasunggu
	- Bantuan Mesin Jahit	50 Buah		√	Desa Tanamalala	Kecamatan Pasimasunggu
	- Pembangunan Pasar Desa	1 Unit		√	Desa Teluk Kampe	Kecamatan Pasimasunggu
	- Bantuan UMKM/ Modal Usaha	1 Paket		√	Desa Kalepadang	Kecamatan Pasimasunggu
	- Bantuan modal Usaha (Bahan dan Peralatan)			√	Desa Bontotangnga	Kecamatan Pasimasunggu
	- Pengadaan Lemari Kue Kelompok Usaha Bersama	2 Unit		√	Kelurahan Putabangun	Kecamatan Pasimasunggu
	- Pemberian bantuan modal untuk koperasi Kelurahan Putabangun	1 Koperasi		√	Kelurahan Putabangun	Kecamatan Pasimasunggu
	- Pengadaan alat-alat Perbengkelan	2 Klp		√	Desa Bontomarannu	Kecamatan Bontomanai
	- Pengadaan Bantuan Alat Perbengkelan			√	Desa Kaburu	Kecamatan Bontomanai
	- Pengadaan Bantuan Alat Pertukangan Batu			√	Desa Kaburu	Kecamatan Bontomanai
	- Bantuan Peralatan Usaha Kecil dan mikro	1 Paket		√	Desa Bontokoraang	Kecamatan Bontomanai
	- Pengadaan alat perbenkelan	1 Paket		√	Desa Polebunging	Kecamatan Bontomanai
	- Pengadaan mesin las	1 Paket		√	Desa Polebunging	Kecamatan Bontomanai
	- Pengadaan alat perbengkelan	1 Paket		√	Desa Polebunging	Kecamatan Bontomanai

- Perbengkelan			√	Desa Mare-Mare	Kecamatan Bontomanai
- Bantuan Modal Usaha Bagi Pedagang Kecil	1 Paket		√	Desa Bontomarannu	Kecamatan Bontomanai
- Pengadaan Oven Kopra	1 Unit		√	Desa Bonea Timur	Kecamatan Bontomanai
- Bantuan Modal Usaha Kecil	15 jt/Klp		√	Desa Bonea Timur	Kecamatan Bontomanai
- Bantuan modal usaha kecil dan Menengah (UKM)	1 Paket		√	Desa Bonea Timur	Kecamatan Bontomanai
- Penambahan modal umkm	50 jt		√	Desa Parak	Kecamatan Bontomanai
- Bantuan Modal usaha dan Menengah			√	Desa Bonea Timur	Kecamatan Bontomanai
- Pengadaan Bantuan di Bidang Pertanian, Peternakan, Industri, Perdagangan, Perikanan dan Kelautan	LS		√	Desa Pamatata	Kecamatan Bontomatene
- Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan koperasi	1 Paket		√	Desa Barat Lambongan	Kecamatan Bontomatene
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					
<i>Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro</i>					
- Pelatihan kewirausahaan			√	Desa Bontotangnga	Kecamatan Pasimasunggu
- Pelatihan menjahit	1 Paket		√	Desa Bontokoraang	Kecamatan Bontomanai
- Pelatihan ukm	1 Kegiatan		√	Desa Jambuiya	Kecamatan Bontomanai

- Pelatihan/bantuan Alat Perbengkelan	3 Klp		√	Desa Bonea Makmur	Kecamatan Bontomanai
- Pelatihan menjahit	1 Paket		√	Desa Polebunging	Kecamatan Bontomanai
- Jahit menjahit Lanjutan			√	Desa Mare-Mare	Kecamatan Bontomanai
- Pelatihan Jahit menjahit	25 jt/Klp		√	Desa Bonea Timur	Kecamatan Bontomanai
- Pelatihan Perbengkelan	30 jt/Klp		√	Desa Bonea Timur	Kecamatan Bontomanai
- Pelatihan Jahit menjahit	1 Paket		√	Desa Bonea Timur	Kecamatan Bontomanai
- Pelatihan Pertukangan + Pengadaan Alat Pertukangan	1 Paket		√	Desa Bonea Timur	Kecamatan Bontomanai
- Pelatihan Pertukangan	1 Paket		√	Desa Bonea Timur	Kecamatan Bontomanai
- Pelatihan Perbengkelan	1 Paket		√	Desa Bonea Timur	Kecamatan Bontomanai
- Pelatihan Jahit menjahit	1 Paket		√	Desa Bonea Timur	Kecamatan Bontomanai
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota					
<i>Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>					
- Penambahan Modal koperasi	50 jt		√	Desa Bonea Timur	Kecamatan Bontomanai
- Pembebasan Lahan Koperasi	17 x 25 M		√	Desa Bonea Timur	Kecamatan Bontomanai

	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan					
	<i>Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>					
	- Pembangunan Pasar Desa	1 Unit		√	Dusun Labuang Mangatti	Kecamatan Pasimasunggu
	- Pembangunan Pasar Desa	1 Unit		√	Desa Teluk Kampe	Kecamatan Pasimasunggu

Sebagian besar dapat diakomodir dikarenakan usulan tersebut memang benar-benar sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan ada usulan yang tidak dapat diakomodir dikarenakan berbagai hal antara lain keterbatasan penyediaan dana. Selain usulan kegiatan dari APBD kabupaten, juga mengusulkan kegiatan untuk memperoleh dana dari APBD provinsi dan APBN.

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2022 Kabupaten Kepulauan Selayar diuraikan dalam tabel T-C.32.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL



Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan penjabarannya dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dalam menyelenggarakan fungsi urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar menyusun kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan kedisiplinan dan kapasitas sumber daya aparatur
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana untuk desa
4. Peningkatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tingkat desa
5. Pembinaan dan peningkatan keberdayaan penduduk miskin
6. Perluasan lapangan kerja
7. Peningkatan kapasitas koperasi dan UKM melalui pemberdayaan potensi, peningkatan nilai tambah dan penguasaan teknologi yang berwawasan lingkungan serta berbasis potensi lokal
8. Mengoptimalkan dukungan terhadap pengembangan produk lokal
9. Meningkatkan produk unggulan daerah
10. Meningkatkan promosi dan pengembangan usaha pelaku Koperasi dan UKM
11. Peningkatan jaringan distribusi logistik untuk menjadikan Kepulauan Selayar sebagai Pusat Distribusi Logistik kawasan Timur Indonesia
12. Pengembangan Kawasan distribusi logistik, untuk ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan
13. Peningkatan efektivitas pengawasan dan iklim usaha perdagangan
14. Meningkatkan perdagangan daerah dengan penguatan pasar dalam negeri



5.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

1. Tujuan

Dengan berlandaskan visi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026, yakni **“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”**, maka Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk masa tahun 2021 – 2026 menetapkan tujuan sebagai berikut dimana visi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah: **“Terwujudnya Ekonomi Kerakyatan yang kuat, berdaya saing dan berkelanjutan”** Visi tersebut di atas mengandung makna:

1. Terwujudnya Ekonomi Kerakyatan yang kuat yaitu untuk mendukung *Perekonomian Daerah yang Kuat* dilandasi perekonomian daerah berbasis *Kerakyatan*
2. Berdaya Saing dan berkelanjutan yakni partisipasi masyarakat yang berkelanjutan dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan rakyat yang didukung oleh perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mampu mengembangkan sektor usaha mikro, kecil dan menengah agar mampu ambil peran dalam dunia usaha nasional.

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk masa tahun 2021-2026 menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2. Meningkatkan kemandirian Koperasi dan UKM

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha
4. Meningkatkan penguatan pasar daerah guna meningkatkan perdagangan dalam negeri

2. Sasaran

Sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan terdapat sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kepulauan Selayar setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Komponen Manajemen Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2. Meningkatkan kemandirian Koperasi dan UKM
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha
4. Meningkatkan penguatan pasar daerah guna meningkatkan perdagangan dalam negeri

5.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan memperhatikan rancangan awal RKPD dan pagu indikatif tahun 2024 dalam Renstra, namun masih ada beberapa program dan kegiatan yang belum bisa diakomodir karena keterbatasan dana/pagu indikatif yang sudah ditetapkan.

✚ Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :

1. Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun
2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan
3. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan fisik yang menjadi skala prioritas

✚ Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan dari tujuan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, maka ditetapkan proyeksi belanja sesuai prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	2024		OPD Penanggung Jawab
				Target	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi KSP/USP yang sehat	Persen	100	100.000.000	Disdag KUKM
2	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang Diberdayakan dan mendapatkan perlindungan	Persen	100	192.226.592	Disdag KUKM
3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang Diberdayakan	Persen	100	631.187.296	Disdag KUKM
4	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang ditingkatkan kapasitasnya	Persen	100	250.000.000	Disdag KUKM
5	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting	Persentase jenis komoditi yang dipantau	Persen	100	226.200.000	Disdag KUKM

6	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam	Persen	100	10.000.000	Disdag KUKM
7	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi sehat	Persen	100	100.000.000	Disdag KUKM
8	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pengurus Koperasi yang mendapatkan pendidikan keterampilan	Persen	100	100.000.000	Disdag KUKM
9	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Izin Usaha Sektor Perdagangan yang diterbitkan	Persen	100	50.000.000	Disdag KUKM
10	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase ketersediaan sarana prasarana perdagangan	Persen	100	205.019.505	Disdag KUKM
11	Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan jumlah komoditi ekspor	Persen	21	0	Disdag KUKM
12	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat ukur yang ditera	Persen	10	100.000.000	Disdag KUKM
13	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	Persentase produk lokal yang dipasarkan	Persen	37	0	Disdag KUKM



- ✚ Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya adalah:
Tetap dilaksanakan sesuai dengan RKA maupun DPA yang telah disahkan, sedangkan program dan kegiatan yang tidak disetujui atau direalisasi akan kami ajukan pada tahun mendatang.
- ✚ *Rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel T-C.33.*

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun ke depan. Rencana Kerja Dinas



Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki dengan menyesuaikan RPJMD serta Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar disesuaikan dengan pagu indikatif yang disetujui dan disahkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, penjabaran rencana kerja dapat dilihat pada lampiran.

Program Prioritas Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam Mendukung 3 Program Prioritas dan 1 Program Unggulan Gerbang Sari Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut :

Bidang Perdagangan :

- ❖ Kegiatan Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan
- ❖ Kegiatan Penyusunan zona kawasan distribusi logistik
- ❖ Kegiatan Pengembangan hubungan dan simpul logistik untuk pendorong distribusi komoditas potensi di Kab. Kep. Selayar
- ❖ Kegiatan Pencanaan daerah tertib ukur

Bidang Koperasi dan UKM :

- ❖ Kegiatan Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil
- ❖ Kegiatan Peningkatan Akses kepada Sumber daya Produktif dalam rangka Pemulihan Ekonomi dengan tujuan Mewujudkan kemandirian koperasi dan UKM sebagai pelaku strategis dalam perekonomian
- ❖ Kegiatan Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pada Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia Yang Produktif Mandiri Maju dan Wawasan Lingkungan dengan tujuan mendorong dan memfasilitasi pengembangan, pemanfaatan dan peningkatan nilai tambah sumber daya koperasi dan UKM



- ❖ Kegiatan Peningkatan Peran Koperasi dan UKM Sebagai Penopang Ekonomi Nasional Yang Kokoh Dalam Rangka Kebangkitan Ekonomi Nasional dengan tujuan mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam rangka pemberdayaan koperasi dan UKM secara terpadu.

Rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel T-C.33.

BAB V

PENUTUP

5.1. CATATAN PENTING

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku kepentingan. Keterlibatan



stakeholder dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Kecamatan hingga Musrenbang tingkat Pemerintah Daerah.

Rekomendasi Perumusan Program dan Kegiatan adalah :

1. Setiap program dan kegiatan baik usulan dari masyarakat hasil musrenbang maupun usulan OPD harus benar-benar dipadukan menjadi satu kesatuan program/kegiatan yang mampu menjembatani antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan Pemerintah.
2. Pengembangan usaha di tiap sektor harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.
3. Pelaksanaan program/kegiatan menekankan pada asas keadilan dan pemerataan antar kelompok masyarakat untuk mengurangi disparitas kesejahteraan.

Monitoring dan evaluasi senantiasa dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur baik di internal OPD, antar OPD dengan masyarakat/kelompok masyarakat penerima manfaat.

5.2. KAIDAH – KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah Pelaksanaan Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (stakeholders), tetap harus dikedepankan.

5.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana Tindak lanjut Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang





adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (stakeholders), tetap harus dikedepankan.

5.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana Tindak lanjut Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 (satu) Tahun kedepan.

Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan.

Demikian rencana kerja disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum rencana kerja tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

KEPALA DINAS



ANDI ABDURRAHMAN, SE, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19670526 199703 1 005





LAMPIRAN



TABEL T.C- 29
 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RUMAH DIMAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
 PENCAPAIAN RENSTRA DIMAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
 PROVINSI SULAWESI SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2021)				Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2022)												
					1	2	3	4															
1	1. Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100												
												1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	1	3	Dokumen	9	3
												2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	1	Dokumen	3	3
												3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	1	Dokumen	3	3
												4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	1	Dokumen	3	3
												5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	1	Dokumen	3	3
												6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	1	4	Laporan	12	3
												7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13	Dokumen	13	Dokumen	13	Dokumen	1	13	Dokumen	39	3
												Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	100	%	100	%	1	100	%	300	3
												1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	39	Orang	39	Orang	39	Orang	1	39	Orang	117	3
												2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	1	Laporan	3	3
												3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	1	12	Laporan	36	3
												4. Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	1	12	Dokumen	36	3
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	%	100	%	100	%	1	100	%	300	3												
1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-												
2. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-												
3. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	1	4	Laporan	12	3												
4. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-												
Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	100	%	100	%	100	%	1	100	%	300	3												
1. Pengadaan Pakaihan Dinas Beserta Akibat Kelengkapannya	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	-	Paket	-	-												
2. Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawain	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	1	4	Dokumen	12	3												

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	
3	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	Dokumen	2	Dokumen	1	2	Dokumen	6	3
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	Orang	4	Orang	1	4	Orang	12	3
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	2	Orang	1	2	Orang	6	3
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Kelancaran Administrasi dan Operasional Perkantoran	100	%	100	%	1	100	%	300	3
1	Penyediaan Peralatan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan	70	Paket	70	Paket	1	70	Paket	210	3
2	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Jumlah paket barang Cetak dan Pengandaian yang Disediakan	83	Paket	83	Paket	1	83	Paket	249	3
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	Dokumen	3	Dokumen	1	3	Dokumen	9	3
4	Facilities Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	500	Laporan	500	Laporan	1	500	Laporan	1500	3
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	272	Laporan	272	Laporan	1	272	Laporan	816	3
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100	%	100	%	1	100	%	300	3
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	Unit	2	Unit	1	2	Unit	6	3
2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7	Unit	7	Unit	1	7	Unit	21	3
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	Unit	7	Unit	1	7	Unit	21	3
4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit	2	Unit	1	2	Unit	6	3
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	1	Unit	1	1	Unit	3	3
6	Penatausahaan Atsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Atsip Dinamis pada SKPD	-	Dokumen	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-
7	Dukungan Peleaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Peleaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	Dokumen	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Kelancaran Administrasi dan Operasional Perkantoran	100	%	100	%	1	100	%	300	3
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	Laporan	100	Laporan	1	100	Laporan	300	3
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	Laporan	3	Laporan	1	3	Laporan	9	3
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	52	Laporan	52	Laporan	1	52	Laporan	156	3
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kelancaran administrasi barang milik daerah	100	%	100	%	1	100	%	300	3
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	1	Unit	1	1	Unit	3	3
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Unit	-	Unit	-	-	Unit	-	-
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	10	Unit	1	10	Unit	30	3
4	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-	Unit	-	Unit	-	-	Unit	-	-
5	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak berwujud yang Dipelihara	-	Unit	-	Unit	-	-	Unit	-	-
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	2	Unit	1	2	Unit	6	3
7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Unit	-	Unit	-	-	Unit	-	-
2. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan		Persentase Izin Usaha Sektor Perdagangan yang diterbitkan (%)	100	%	100	%	1	100	%	300	3
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Jumlah rekomendasi izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan yang diterbitkan	200	Izin	200	Izin	1	200	Izin	600	3

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (8+7+9)	11 = (10/4)
1.	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kelembagaan	6 Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang	1	6 Orang	18	3
13.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang Diberdayakan	%	50 %	50 %	50 %	1	50 %	150	3
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang diberdayakan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	150 UMKM	150 UMKM	150 UMKM	150 UMKM	1	150 UMKM	450	3
1.	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	1	30 Unit Usaha	90	3
2.	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	1	30 Unit Usaha	90	3
3.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	3 Unit Usaha	3 Unit Usaha	3 Unit Usaha	3 Unit Usaha	1	3 Unit Usaha	9	3
4.	Facilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	1	200 Unit Usaha	600	3
5.	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	1	150 Orang	450	3
14.	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang ditingkatkan kapasitasnya	50 %	50 %	50 %	50 %	1	50 %	150	3
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah UMKM yang Naik kelas dari Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)	50 UMK	50 UMK	50 UMK	50 UMK	1	50 UMK	150	3
1.	Facilitasi Usaha Mikro menjadi usaha kecil dalam Pengembangan Produk dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terasiliasi dalam Pengembangan Produk dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	37 Unit Usaha	37 Unit Usaha	37 Unit Usaha	37 Unit Usaha	1	37 Unit Usaha	111	3

Benteng, 17 Maret 2023

KEPALA DINAS



ANDI ABDURRAHMAN, SE., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19670826 199703 1 005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	
Persentase Laporan Administrasi BMD yang tersusun				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				Dok	Dok	-	-	Dok	Dok	-	-	
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				Lap	Lap	-	-	Lap	Lap	-	-	
Jumlah Laporan Rekonstruksi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				-	-	-	-	-	-	-	-	
Persentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang	
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	
Persentase Kelancaran Administrasi dan Operasional Perkantoran				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				70 Paket	70 Paket	70 Paket	70 Paket	70 Paket	70 Paket	70 Paket	70 Paket	
Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				75 Paket	83 Paket	87 Paket	90 Paket	75 Paket	83 Paket	87 Paket	90 Paket	
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	
Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				500 Lap	500 Lap	500 Lap	510 Lap	500 Lap	500 Lap	500 Lap	510 Lap	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Jumlah jenis pupuk dan pestisida bersubsidi yang diawali penggunaannya				4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis
Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan				7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok
Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Persentase peningkatan jumlah komoditi ekspor				17%	19%	21%	23%	17%	19%	21%	23%	
Jumlah barang/jasa atau komoditi unggulan daerah serta perluasan pasar yang dikembangkan				15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis
Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina				6 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha
Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha
Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha
Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha
Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi				6 Produk	6 Produk	6 Produk	6 Produk	6 Produk	6 Produk	6 Produk	6 Produk	6 Produk
Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina				6 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha
Persentase alat ukur yang ditera				10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Alat UTTP bertanda tera SAH yang bertaku				60%	70%	80%	90%	60%	70%	80%	90%	
Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perengkapan Ditera Ulang				650 Unit	650 Unit	650 Unit	650 Unit	650 Unit	650 Unit	650 Unit	650 Unit	650 Unit

6.

5.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	<p>Perentase UMKM yang ditingkatkan kapasitasnya</p> <p>Jumlah UMKM yang Naik kelas dari Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil melalui Pusat layanan usaha Terpadu (PLUT)</p> <p>Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengerjaan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi</p>			50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	
				50 UMK	50 UMK	50 UMK	50 UMK	50 UMK	50 UMK	50 UMK	50 UMK	
				37 Unit Usaha	37 Unit Usaha	37 Unit Usaha	37 Unit Usaha	37 Unit Usaha	37 Unit Usaha	37 Unit Usaha	37 Unit Usaha	

Banjene, 17 Maret 2023

KEPALA DINAS



ANDI ABDURRAHMAN, SE., M.Si

Pangkat : Pemihna Utama Muda

NIP. 19670526199703 1 005

TABEL T-C. 32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Besar Volume	Catatan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Kep. Selayar	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kep. Selayar	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun	100%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kep. Selayar	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 laporan	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 laporan		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kep. Selayar	Persentase Laporan Administrasi BMD yang tersusun	100%		
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kep. Selayar	Persentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%		
Pengadaan Pakai Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Paket Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket		
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen		
Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Besar Volume	Catatan
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kep. Selayar	Persentase Kelancaran Administrasi dan Operasional Perkantoran	100%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	70 Paket	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kep. Selayar	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	87 Paket	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	
	Facilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	500 Laporan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	272 Laporan	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kep. Selayar	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	
	Pengadaan Mebel	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	
	Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kep. Selayar	Persentase Kelancaran Administrasi dan Operasional Perkantoran	100	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	52 Laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kep. Selayar	Persentase kelancaran administrasi barang milik daerah	100%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya	Unit	
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Aset Tak berwujud yang Dipelihara	Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	2 Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Unit	

No	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Besar Volume	Catatan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
	2 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Kab. Kep. Selayar		60	
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Kab. Kep. Selayar	Persentase peningkatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	100%	
	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	250 Dokumen	
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Kep. Selayar		-	
	Facilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	-	
	Penerbitas Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba dalam Negeri	Kab. Kep. Selayar		-	
	Facilitas Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan waralaba (STPW) dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	-	
	Facilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) dalam Negeri	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	-	
	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Kab. Kep. Selayar		-	
	Facilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-	
	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Selayar		-	
	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	-	
	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya Bagi P-B2 dan PA-B2	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	-	
	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	-	
	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Kab. Kep. Selayar		-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	-	
	3 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kab. Kep. Selayar	Persentase ketersediaan sarana prasarana perdagangan	100	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kep. Selayar	Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik	30 Sarana	
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	
	Facilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Besar Volume	Catatan
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kab. Kep. Selayar	Jumlah pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan	90%	
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	
	Pembudayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	
4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK BARANG PENTING	Kab. Kep. Selayar	Persentase jenis komoditi yang dipantau (%)	50%	
	Menjamin ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah kabupaten/Kota	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Akses Kebutuhan Pokok yang dipantau	11 Kecamatan	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar rakyat	1 Laporan	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	11 Laporan	
	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	
	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Selayar	Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dikendalikan	1 Kabupaten	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 Laporan	
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/Kota	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/Kota	1 Laporan	
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Selayar	Jumlah jenis pupuk dan pestisida bersubsidi yang diawali penggunaannya	4 Jenis	
	Pemeriksaan kelengkapan Legalisasi Dokumen Perizinan	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalisasi Dokumen Perizinan	7 Dokumen	
	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida bersubsidi	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	1 Laporan	
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 Laporan	
5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Kab. Kep. Selayar	Persentase peningkatan jumlah komoditi ekspor	21	
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Selayar	Jumlah barang/jasa atau komoditi unggulan daerah serta perluasan pasar yang dikembangkan	15 Jenis	
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/kota	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	6 Pelaku Usaha	
	Pameran dagang Nasional	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	2 Pelaku Usaha	
	Pameran Dagang Lokal	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	2 Pelaku Usaha	
	Misi Dagang Bagi Ekpor Unggulan	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2 Pelaku Usaha	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Besar Volume	Catatan
	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	6 Produk	
	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	6 Pelaku Usaha	
6	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Kab. Kep. Selayar	Persentase alat ukur yang ditera	10	
	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kab. Kep. Selayar	Alat UTPP bertanda tera SAH yang berlaku	80	
	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa, Tera, Tera Ulang	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perangkapan Ditera Ulang	650 Unit	
	Pengawasan/Perwujudan Metrologi Legal	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	231 Orang	
	Penyidikan Metrologi Legal	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	1500 Unit	
7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Kab. Kep. Selayar	Persentase produk lokal yang dipasarkan	37	
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	Kab. Kep. Selayar	Jumlah prasarana yang digunakan dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri	5 Media	
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Selayar	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	100 UMKM	
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Selayar	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	100 UMKM	
	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 Dokumen	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
8	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Kab. Kep. Selayar	Persentase Koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam	100%	
	Perubahan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Selayar	Jumlah koperasi yang mendapatkan izin usaha	2 Koperasi	
	Facilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit Usaha	
	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Selayar	Jumlah koperasi simpan pinjam yang berrAT	1 Koperasi	
	Facilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit Usaha	
9	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kab. Kep. Selayar	Persentase koperasi sehat	100	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Koperasi percontohan	3 Koperasi	
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Kelangguhan, Serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Kelangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	162 Unit Usaha	
	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	30 Unit Usaha	
10	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Kab. Kep. Selayar	Persentase Koperasi KSP/USP yang sehat	100	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Koperasi yang Sehat organisasi, Sehat Usaha dan Sehat Administrasi	10 Koperasi	
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	2 Unit Usaha	
	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	30 Unit Usaha	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Besar Volume	Catatan
11	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Pendidikan dan Latihan Perkoprasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoprasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Kep. Selayar Kab. Kep. Selayar Kab. Kep. Selayar	Persentase Pengurus Koperasi yang mendapatkan pendidikan keterampilan Jumlah Koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkoprasian Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoprasian	50 35 Koperasi 60 Orang	
12	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOOPERASI Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Selayar	Persentase Koperasi yang Diberdayakan dan mendapatkan perlindungan Jumlah Koperasi Sehat	100% 6 Koperasi	
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Selayar	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	6 Orang	
13	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM) Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Pendataan Polensi dan Pengembangan Usaha Mikro Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro Pemberdayaan Kelembagaan Polensi dan Pengembangan Usaha Mikro Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kab. Kep. Selayar Kab. Kep. Selayar Kab. Kep. Selayar Kab. Kep. Selayar Kab. Kep. Selayar	Persentase UMKM yang Diberdayakan Jumlah UMKM yang diberdayakan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	100% 30 UMKM 30 Unit Usaha 30 Unit Usaha 30 Unit Usaha 30 Unit Usaha 3 Unit Usaha 200 Unit Usaha 150 Orang	
14	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil Fasilitasi Usaha Mikro menjadi usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	Kab. Kep. Selayar Kab. Kep. Selayar Kab. Kep. Selayar	Persentase UMKM yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	50% 50 UMKM 37 Unit Usaha	

Benteng, 17 Maret 2023

KEPALA DINAS

ANDI ABDURRAHMAN, SE., M.Si

Pangkat /Pemjua Utama Muda

NIP. 19670526 199703 1 005



RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Tabel T-C. 33

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024		Rencana Tahun 2025				
				Target	Pagu Indikator (Rp.)	Target	Pagu Indikator (Rp.)			
3 31 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun	Kab. Kep. Selayar	100%	6.534.093.589	Kab. Kep. Selayar	100%	6.690.846.494		
3 31 01 2 01			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kep. Selayar	100%	175.000.000	Kab. Kep. Selayar	100%	199.000.000	
3 31 01 2 01 01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kep. Selayar	3 Dokumen	35.000.000	Kab. Kep. Selayar	3 Dokumen	40.000.000	
3 31 01 2 01 02			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	16.500.000	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	19.000.000	
3 31 01 2 01 03			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	16.500.000	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	19.000.000	
3 31 01 2 01 04			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	10.000.000	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	13.000.000	
3 31 01 2 01 05			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	10.000.000	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	13.000.000	
3 31 01 2 01 06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kep. Selayar	4 laporan	46.000.000	Kab. Kep. Selayar	4 laporan	50.000.000	
3 31 01 2 01 07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kep. Selayar	13 Laporan	41.000.000	Kab. Kep. Selayar	13 Laporan	45.000.000	
3 31 1 2 02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kab. Kep. Selayar	100%	4.374.479.224	Kab. Kep. Selayar	100%	4.424.437.906
3 31 1 2 02 01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kep. Selayar	39 Orang	4.339.179.224	Kab. Kep. Selayar	39 Orang	4.382.937.906
3 31 1 2 02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	15.300.000	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	17.500.000		
3 31 1 2 02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kep. Selayar	12 laporan	11.000.000	Kab. Kep. Selayar	12 laporan	13.000.000		
3 31 1 2 02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kep. Selayar	12 laporan	9.000.000	Kab. Kep. Selayar	12 laporan	11.000.000		
3 31 1 2 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi BMKD yang tersusun	Kab. Kep. Selayar	100%	11.000.000	Kab. Kep. Selayar	100%	13.000.000		
3 31 01 2 03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kep. Selayar	Dokumen	-	Kab. Kep. Selayar	Dokumen	-		
3 31 01 2 03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kep. Selayar	Laporan	-	Kab. Kep. Selayar	Laporan	-		
3 31 01 2 03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kep. Selayar	4 laporan	11.000.000	Kab. Kep. Selayar	4 laporan	13.000.000		
3 31 01 2 03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kep. Selayar	Laporan	-	Kab. Kep. Selayar	Laporan	-		
3 31 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Kep. Selayar	100%	132.500.000	Kab. Kep. Selayar	100%	146.200.000		
3 31 01 2 05 02	Pengadaan Pakaihan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaihan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kep. Selayar	Paket	-	Kab. Kep. Selayar	Paket	-		
3 31 01 2 05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kep. Selayar	4 Dokumen	15.000.000	Kab. Kep. Selayar	4 Dokumen	17.000.000		
3 31 01 2 05 05	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kep. Selayar	2 Dokumen	10.000.000	Kab. Kep. Selayar	2 Dokumen	10.000.000		
3 31 01 2 05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kep. Selayar	4 Orang	80.000.000	Kab. Kep. Selayar	4 Orang	90.000.000		
3 31 01 2 05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kep. Selayar	2 Orang	27.500.000	Kab. Kep. Selayar	2 Orang	29.200.000		
3 31 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kelancaran Administrasi dan Operasional	Kab. Kep. Selayar	100%	678.200.000	Kab. Kep. Selayar	100%	706.900.000		
3 31 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kep. Selayar	70 Paket	200.000.000	Kab. Kep. Selayar	70 Paket	211.000.000		
3 31 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Kab. Kep. Selayar	87 Paket	70.000.000	Kab. Kep. Selayar	90 Paket	72.000.000		

3	31	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Binaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Binaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Kep. Selayar	3 Dokumen	8.000.000		Kab. Kep. Selayar	3 Dokumen	11.000.000
3	31	01	2	06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Kep. Selayar	500 Laporan	34.700.000		Kab. Kep. Selayar	510 Laporan	37.000.000
3	31	01	2	06	09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kep. Selayar	272 Laporan	365.500.000		Kab. Kep. Selayar	282 Laporan	375.900.000
3	31	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkatoran	Kab. Kep. Selayar	100%	434.000.000		Kab. Kep. Selayar	100%	450.000.000
3	31	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Kep. Selayar	2 Unit	40.000.000		Kab. Kep. Selayar	2 Unit	40.000.000
3	31	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Kep. Selayar	7 Unit	145.000.000		Kab. Kep. Selayar	7 Unit	150.000.000
3	31	01	2	07	06	Pengadaan Perakitan dan Mesin/ Lainnya	Jumlah Unit Perakitan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kep. Selayar	7 Unit	105.000.000		Kab. Kep. Selayar	7 Unit	110.000.000
3	31	01	2	07	08	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kep. Selayar	2 Unit	118.000.000		Kab. Kep. Selayar	2 Unit	122.000.000
3	31	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kep. Selayar	1 Unit	26.000.000		Kab. Kep. Selayar	1 Unit	28.000.000
2	11	01	2	06	10	Penatausahaan Aisip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Aisip Dinamis pada SKPD	Kab. Kep. Selayar	Dokumen			Kab. Kep. Selayar	Dokumen	
2	11	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kep. Selayar	Dokumen			Kab. Kep. Selayar	Dokumen	
3	31	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Operasional Perkatoran	Kab. Kep. Selayar	100	593.300.000		Kab. Kep. Selayar	100	607.000.000
3	31	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kep. Selayar	100 Laporan	7.500.000		Kab. Kep. Selayar	100 Laporan	11.000.000
3	31	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kep. Selayar	3 Laporan	86.100.000		Kab. Kep. Selayar	3 Laporan	88.000.000
3	31	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kep. Selayar	52 Laporan	499.700.000		Kab. Kep. Selayar	52 Laporan	508.000.000
3	31	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kelancaran administrasi barang milik daerah	Kab. Kep. Selayar	100%	135.614.365		Kab. Kep. Selayar	100%	144.308.588
3	31	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kep. Selayar	1 Unit	64.800.000		Kab. Kep. Selayar	1 Unit	68.600.000
3	31	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	Kab. Kep. Selayar	Unit			Kab. Kep. Selayar	Unit	
3	31	01	2	09	06	Pemeliharaan Perakitan dan Mesin/ Lainnya	Jumlah Perakitan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kep. Selayar	10 Unit	20.514.000		Kab. Kep. Selayar	10 Unit	22.000.000
3	31	01	2	09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kep. Selayar	Unit			Kab. Kep. Selayar	Unit	
3	31	01	2	09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kab. Kep. Selayar	Unit			Kab. Kep. Selayar	Unit	
3	31	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	Kab. Kep. Selayar	2 Unit	50.300.365		Kab. Kep. Selayar	2 Unit	53.708.588
3	31	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	Kab. Kep. Selayar	Unit			Kab. Kep. Selayar	Unit	
3	30	02				URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN								
3	30	02				Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan								
3	30	02	2	01		Perubahan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase peningkatan Penorotan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Kab. Kep. Selayar	60	50.000.000		Kab. Kep. Selayar	60	106.398.977
3	30	02	2	01	01	Perubahan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Kep. Selayar	250 Dokumen	25.000.000		Kab. Kep. Selayar	250 Dokumen	106.398.977
3	30	02	2	02		Perubahan Tanda Daftar Gudang								
3	30	02	2	02	01	Perubahan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Kab. Kep. Selayar	-	-		Kab. Kep. Selayar	-	-
3	30	02	2	02	01	Perubahan Tanda Pendaftaran Waralaba (STPMW) untuk Pemertama Waralaba dari Waralaba dalam Negeri	Jumlah Dokumen Pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPMW) Dalam Negeri	Kab. Kep. Selayar	-	-		Kab. Kep. Selayar	-	-
3	30	02	2	03	01	Perubahan Tanda Pendaftaran Waralaba (STPMW) dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPMW) Dalam Negeri	Kab. Kep. Selayar	-	-		Kab. Kep. Selayar	-	-
3	30	02	2	03	02	Perubahan Tanda Pendaftaran Waralaba (STPMW) dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPMW) Dalam Negeri	Kab. Kep. Selayar	-	-		Kab. Kep. Selayar	-	-
3	30	02	2	04		Perubahan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Lansung Minum di Tempat								
3	30	02	2	04	01	Perubahan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Lansung Minum di Tempat	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Lansung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diperiksa Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Kep. Selayar	-	25.000.000		Kab. Kep. Selayar	-	-
3	30	02	2	05	01	Perubahan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Lansung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diperiksa Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Kep. Selayar	-	25.000.000		Kab. Kep. Selayar	-	-

3	30	02	2	06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Beracun di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Kab. Kep. Selayar	-	-	Kab. Kep. Selayar	-	-		
3	30	02	2	06	01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Kab. Kep. Selayar	-	-	Kab. Kep. Selayar	-	-		
3	30	02	2	06	02	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya Bagi P-B2 dan PA-B2	Kab. Kep. Selayar	-	-	Kab. Kep. Selayar	-	-		
3	30	02	2	06	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Kab. Kep. Selayar	-	-	Kab. Kep. Selayar	-	-		
3	30	02	2	07	01	Penelitian Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai Instansi Kependidikan dan Sinkronisasi Layanan Perbaikan SKA)	Kab. Kep. Selayar	-	-	Kab. Kep. Selayar	-	-		
3	30	03			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Penyerahan Surat Keterangan Asal	Kab. Kep. Selayar	100	205.019.505	Kab. Kep. Selayar	100	158.588.466		
3	30	03	2	01	Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase ketersediaan sarana prasana perdagangan	Kab. Kep. Selayar	30 Sarana	55.019.505	Kab. Kep. Selayar	30 Sarana	95.588.466		
3	30	03	2	01	01	Perbaikan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kep. Selayar	1 Unit	-	Kab. Kep. Selayar	1 Unit	43.058.466		
3	30	03	2	01	02	01	Perbaikan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kep. Selayar	2 Unit	55.019.505	Kab. Kep. Selayar	2 Unit	52.500.000	
3	30	03	2	02	01	01	Perbaikan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kab. Kep. Selayar	90%	150.000.000	Kab. Kep. Selayar	90%	64.000.000	
3	30	03	2	02	01	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	100.000.000	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	36.000.000	
3	30	03	2	02	02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	50.000.000	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	28.000.000	
3	30	03	2	02	02	02	Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kep. Selayar	50%	226.200.000	Kab. Kep. Selayar	50%	476.795.388	
3	30	04			Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Akses Kebutuhan Pokok yang dipantau	Kab. Kep. Selayar	11 Kecamatan	125.000.000	Kab. Kep. Selayar	11 Kecamatan	157.900.000		
3	30	04	2	01	01	01	Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	25.000.000	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	52.700.000	
3	30	04	2	01	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kep. Selayar	11 Laporan	50.000.000	Kab. Kep. Selayar	11 Laporan	52.700.000	
3	30	04	2	01	02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	50.000.000	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	52.500.000	
3	30	04	2	01	03	01	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	50.000.000	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	52.500.000	
3	30	04	2	02	01	01	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kep. Selayar	1 Kabupaten	101.200.000	Kab. Kep. Selayar	1 Kabupaten	281.000.000	
3	30	04	2	02	02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	50.000.000	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	123.900.000	
3	30	04	2	02	02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	104.700.000	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	104.700.000	
3	30	04	2	02	02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	51.200.000	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	52.400.000	
3	30	04	2	03	01	01	Pemantauan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Selayar	4 Jenis	-	Kab. Kep. Selayar	4 Jenis	39.895.398	
3	30	04	2	03	01	02	Pemantauan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Selayar	7 Dokumen	-	Kab. Kep. Selayar	7 Dokumen	17.000.000	
3	30	04	2	03	02	01	Pemantauan Ketersediaan Legalitas Dokumen Perizinan	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	-	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	11.895.398	
3	30	04	2	03	02	02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida bersubsidi	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	-	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	11.000.000	
3	30	04	2	03	03	01	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	-	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	11.000.000	
3	30	05			Program Pengembangan Ekspor	Jumlah barang/jasa atau komoditi unggulan daerah	Kab. Kep. Selayar	21	-	Kab. Kep. Selayar	23	191.518.159		
3	30	05	2	01	01	01	Pembiayaan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah barang/jasa atau komoditi unggulan daerah serta perahun pasar yang dikembangkan	Kab. Kep. Selayar	15 Jenis	-	Kab. Kep. Selayar	15 Jenis	191.518.159

3	30	05	2	01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan KabupatenKotia	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dilina	Kab. Kep. Selayar	6 Pelaku Usaha	-	Kab. Kep. Selayar	6 Pelaku Usaha	27.268.159
3	30	05	2	01	02	Pameran dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Disafiliasi dalam Pameran Dagang	Kab. Kep. Selayar	2 Pelaku Usaha	-	Kab. Kep. Selayar	2 Pelaku Usaha	32.000.000
3	30	05	2	01	03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Disafiliasi dalam Pameran Dagang Lokal	Kab. Kep. Selayar	2 Pelaku Usaha	-	Kab. Kep. Selayar	2 Pelaku Usaha	28.750.000
3	30	05	2	01	04	Misi Dagang Bagi Ekpor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Disafiliasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Kab. Kep. Selayar	2 Pelaku Usaha	-	Kab. Kep. Selayar	2 Pelaku Usaha	52.000.000
3	30	05	2	01	05	Pengickam Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Memadai Materi Promosi	Kab. Kep. Selayar	6 Produk	-	Kab. Kep. Selayar	6 Produk	26.750.000
3	30	05	2	01	06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dilina	Kab. Kep. Selayar	6 Pelaku Usaha	-	Kab. Kep. Selayar	6 Pelaku Usaha	26.750.000
3	30	04	2	01		Program Standartisasi dan Perlindungan Konsumen (2)	Persentase alat ukur yang ditera	Kab. Kep. Selayar	10	100.000.000	Kab. Kep. Selayar	10	446.875.705
3	30	04	2	01	01	Peleaksanaan Metrologi Legal Berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Pengickaman Dilina Ulang	Kab. Kep. Selayar	650 Unit	50.000.000	Kab. Kep. Selayar	650 Unit	168.875.705
3	30	04	2	01	02	Pengawasan/Perubahan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dilina	Kab. Kep. Selayar	231 Orang	50.000.000	Kab. Kep. Selayar	231 Orang	211.000.000
3	30	04	2	01	03	Penyediaan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyediaan Metrologi Legal	Kab. Kep. Selayar	1500 Unit	-	Kab. Kep. Selayar	1500 Unit	67.000.000
3	30	07	2	01		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	Persentase produk lokal yang dipasarkan	Kab. Kep. Selayar	37	-	Kab. Kep. Selayar	39	106.388.977
3	30	07	2	01	01	Peleaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	Jumlah prasarana yang digunakan dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri	Kab. Kep. Selayar	5 Media	-	Kab. Kep. Selayar	5 Media	106.388.977
3	30	07	2	01	01	Peleaksanaan Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat KabupatenKotia	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat KabupatenKotia	Kab. Kep. Selayar	100 UMKM	-	Kab. Kep. Selayar	100 UMKM	17.198.977
3	30	07	2	01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat KabupatenKotia	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemirnan dengan Retai, Marketplace, Perickolan dan Jasa Akomodasi	Kab. Kep. Selayar	100 UMKM	-	Kab. Kep. Selayar	100 UMKM	47.200.000
3	30	07	2	01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	-	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	72.000.000
2	17	02				URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Persentase koperasi yang mendapatkan izin usaha	Kab. Kep. Selayar	100%	10.000.000	Kab. Kep. Selayar	100%	10.486.205
2	17	02	2	01		Program Peleayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Jumlah koperasi yang mendapatkan izin usaha	Kab. Kep. Selayar	2 Koperasi	5.000.000	Kab. Kep. Selayar	2 Koperasi	5.248.103
2	17	02	2	01	01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah KabupatenKotia	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah KabupatenKotia	Kab. Kep. Selayar	1 Unit Usaha	5.000.000	Kab. Kep. Selayar	1 Unit Usaha	5.248.103
2	17	02	2	01	02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah KabupatenKotia	Jumlah koperasi simpan pinjam yang berPAT	Kab. Kep. Selayar	1 Koperasi	5.000.000	Kab. Kep. Selayar	1 Koperasi	5.248.102
2	17	02	2	02	01	Facilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah KabupatenKotia	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah KabupatenKotia	Kab. Kep. Selayar	1 Unit Usaha	5.000.000	Kab. Kep. Selayar	1 Unit Usaha	5.248.102
2	17	03				Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi sehat	Kab. Kep. Selayar	100	100.000.000	Kab. Kep. Selayar	100	127.678.773
2	17	03	2	01		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam/Unit Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah KabupatenKotia	Jumlah Koperasi percontohan	Kab. Kep. Selayar	3 Koperasi	100.000.000	Kab. Kep. Selayar	3 Koperasi	127.678.773
2	17	03	2	01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, kemardifian, Ketanggulan, Serta Akuntabilitas Koperasi Kemewangan KabupatenKotia	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemardifian, Ketanggulan, serta Akuntabilitas Koperasi Kemewangan KabupatenKotia	Kab. Kep. Selayar	162 Unit Usaha	50.000.000	Kab. Kep. Selayar	162 Unit Usaha	73.678.773
2	17	03	2	01	02	Pemeriksaan Kepatuhn Koperasi/terhadap Peraturan-Perundang-Undangan Kemewangan KabupatenKotia	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan-Perundang-Undangan Kemewangan KabupatenKotia Kinerja	Kab. Kep. Selayar	30 Unit Usaha	50.000.000	Kab. Kep. Selayar	30 Unit Usaha	54.000.000
2	17	04				Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi KSP/USP yang sehat	Kab. Kep. Selayar	100	100.000.000	Kab. Kep. Selayar	100	132.998.722
2	17	04	2	01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah KabupatenKotia	Jumlah Koperasi yang Sehat organisasi, Sehat Usaha dan Sehat Administrasi	Kab. Kep. Selayar	10 Koperasi	100.000.000	Kab. Kep. Selayar	10 Koperasi	132.998.722
2	17	04	2	01	01	Peleaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kemewangan KabupatenKotia	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Kab. Kep. Selayar	2 Unit Usaha	50.000.000	Kab. Kep. Selayar	2 Unit Usaha	39.000.000

2	17	04	2	01	02	Peningkatan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan KabupatenKota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Kab. Kep. Selayar	30 Unit Usaha	50.000.000	Kab. Kep. Selayar	30 Unit Usaha	93.998.722
2	17	05	2	01	01	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pengurus Koperasi yang mendapatkan pendidikan keterampilan	Kab. Kep. Selayar	50	100.000.000	Kab. Kep. Selayar	50	90.439.131
2	17	05	2	01	01	Wilyah Keagadaannya dalam Daerah KabupatenKota	Jumlah Koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Kab. Kep. Selayar	35 Koperasi	100.000.000	Kab. Kep. Selayar	40 Koperasi	90.439.131
2	17	05	2	01	01	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kab. Kep. Selayar	60 Orang	100.000.000	Kab. Kep. Selayar	60 Orang	90.439.131
2	17	06	2	01	01	Program Pemberdayaan dan Perindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang Diberdayakan dan mendapatkan perlindungan	Kab. Kep. Selayar	100%	192.226.592	Kab. Kep. Selayar	100%	196.838.108
2	17	06	2	01	01	Pemberdayaan dan Perindungan Koperasi yang Keagadaannya dalam Daerah KabupatenKota	Jumlah Koperasi Sehat	Kab. Kep. Selayar	6 Koperasi	192.226.592	Kab. Kep. Selayar	6 Koperasi	196.838.108
2	17	06	2	01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan KabupatenKota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Kab. Kep. Selayar	6 Orang	192.226.592	Kab. Kep. Selayar	6 Orang	196.838.108
2	17	07	2	01	01	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang Diberdayakan	Kab. Kep. Selayar	100%	613.187.296	Kab. Kep. Selayar	100%	627.897.660
2	17	07	2	01	01	Pendataan, Kemitraan, kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Keperintan	Jumlah UMKM yang diberdayakan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku Keperintan	Kab. Kep. Selayar	30 UMKM	613.187.296	Kab. Kep. Selayar	30 UMKM	627.897.660
2	17	07	2	01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan KabupatenKota	Kab. Kep. Selayar	30 Unit Usaha	101.187.296	Kab. Kep. Selayar	30 Unit Usaha	102.897.660
2	17	07	2	01	02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Kep. Selayar	30 Unit Usaha	152.000.000	Kab. Kep. Selayar	30 Unit Usaha	156.000.000
2	17	07	2	01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Meremaja Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Kab. Kep. Selayar	3 Unit Usaha	125.000.000	Kab. Kep. Selayar	3 Unit Usaha	128.000.000
2	17	07	2	01	03	Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Kab. Kep. Selayar	200 Unit Usaha	83.000.000	Kab. Kep. Selayar	200 Unit Usaha	86.000.000
2	17	07	2	01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para Pemangku Keperintan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Keperintan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kab. Kep. Selayar	150 Orang	152.000.000	Kab. Kep. Selayar	150 Orang	155.000.000
2	17	08	2	01	01	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Kep. Selayar	50%	250.000.000	Kab. Kep. Selayar	50%	252.697.571
2	17	08	2	01	01	Siala Usaha menjadi Usaha Kecil	Persentase Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produk dan Penguatan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab. Kep. Selayar	50 UMK	250.000.000	Kab. Kep. Selayar	50 UMK	252.697.571
2	17	08	2	01	01	Fasilitas Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produk dan Penguatan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produk dan Penguatan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab. Kep. Selayar	37 Unit Usaha	250.000.000	Kab. Kep. Selayar	37 Unit Usaha	252.697.571
							Total			8.480.726.982			9.619.478.346

Benteng, 17 Maret 2023

KEPALA DINAS



ANDI ABDURRAHMAN, SE., M.Si
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19670526 199703 1 005

USULAN KEGIATAN PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2024

No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN
BIDANG PERDAGANGAN					
1	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	1. Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor 2. Peningkatan Citra Produk Ekspor	1. Pelatihan kepada Pelaku Usaha di 11 Kecamatan di Kab. Kepulauan Selayar 2. Pameran Dagang Nasional	Rp 200.000.000 Rp 200.000.000
BIDANG KOPERASI DAN UKM					
1	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi operasi yang wilayah keanggotaanya dalam Daerah Kab/Kota	Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi di Setiap Kecamatan (Koperasi Percontohan)	Koperasi yang pengelolaan kelembagaan Melalui Peningkatan SDM meningkat	Rp 500.000.000
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENJADI USAHA KECIL DAN USAHA MENENGAH	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan Melalui Pendataan, Mitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Peningkatan dan Pemberdayaan Sentra-Sentra UKM sesuai Potensi Desa dalam Rangka Pelaksanaan Program Gerbang Sari	Terlaksananya Program Unggulan Daerah " GERBANG SARI" untuk meningkatkan masyarakat yang sejahtera dalam wadah OVOU	Rp 750.000.000

Benteng, 17 Maret 2023

KERPAK DINAS

ANDI ABUJRAHMAN, SE., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19670526 199703 1 005



Indikator Kinerja Kunci Keluaran/Output

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja (%)	Sumber Data	Keterangan
1.	Bidang Perdagangan	484. Persentase Perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :	Jumlah izin pusat perbelanjaan Yang diterbitkan \leq 5 hari kerja $\frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100\%$ Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar	$\frac{69}{69} \times 100$	100	Bidang Perdagangan	Ada Bukti Pendukung
		b. Toko Swalayan	Jumlah izin toko swalayan yang di terbitkan \leq 5 hari kerja $\frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100\%$ Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar	$\frac{9}{9} \times 100$	100	Bidang Perdagangan	Ada Bukti Pendukung
		487. Persentase penerbitan TDG	Jumlah penerbitan TDG \leq 5 hari kerja $\frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100\%$ Jumlah permohonan penerbitan TDG	-	-	Bidang Perdagangan	Tidak ada pengajuan permohonan untuk penerbitan TDG pada tahun 2022

		488.	Percentase gudang yang tidak mempunyai TDG	Jumlah penerbihan TDG _____ X 100 % Jumlah gudang yang ada di kab. kota	-	-	Bidang Perdagangan	Tidak ada pengajuan permohonan untuk penerbihan TDG pada tahun 2022	
		489.	Percentase penerbihan STPW yang tepat waktu untuk :	Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar _____ X 100 % Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dlm negeri	-	-	Bidang Perdagangan	Belum ada penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	
			a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar _____ X 100 % Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dlm negeri	-	-	Bidang Perdagangan	Belum ada penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	
			b. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar _____ X 100 % Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dlm negeri	-	-	Bidang Perdagangan	Belum ada penerima waralaba lanjutan	
			c. Penerima waralaba lanjutan	Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar _____ X 100 % Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba	-	-	Bidang Perdagangan	Belum ada penerima waralaba lanjutan	

				lanjutan dari waralaba di luar negeri					Belum ada fasilitas pembiayaan bahan berbahaya dan pengemasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kab/kota
		490.	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengemasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab./Kota	Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengemasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kab kota $\frac{\quad}{\quad} \times 100 \%$ Jumlah permohonan SIUP bahan berbahaya bagi pengecer	-	-	Bidang Perdagangan		
		491.	Persentase penerbitan SKPA yang tepat waktu		-	-	Bidang Perdagangan		Belum ada permohonan untuk penerbitan SKA
		492.	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya.	Pengelolaan Dibia $\frac{\quad}{\quad} \times 100 \%$ Jumlah keseluruhan pengelola pasar	$\frac{38}{38} \times 100$	100	Bidang Perdagangan		Aku Bukti Pendukung
		493.	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Persentase koefisien variasi harga antar waktu perkomodifitas pokok	-	-	Bidang Perdagangan		Aku Bukti Pendukung
		495.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun 2022 $\frac{\quad}{\quad} \times 100 \%$	-	-	Bidang Perdagangan		Adanya kesalahan penyetaraan jabatan ke jabatan fungsional

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
			Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku $\frac{\text{Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan}}{\text{Yang berlaku}} \times 100 \%$	$\frac{24}{24} \times 100$	100	Bidang Perdagangan	penera sehingga pelayanan tera dan tera ulang tidak dapat terlaksana	
		496.	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku				Ada Bukti Pendukung	
1.	Bidang Perindustrian	500.	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (UKI) dan izin perluasan kawasan industri (PKI) yang lokasinya di daerah Kabupaten/Kota	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan $\frac{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}}{\text{Capaian target tahapan penyelesaian RPIK tahapan :}} \times 100$	$\frac{1}{1} \times 100$	100	Bidang Perindustrian	Ada Bukti Pendukung
		501	Persentase terselesainya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	a. Tersusunnya naskah akademi (30%) b. Tersusunnya draf raperda RPIK (20%) c. Draf raperda RPIK yang disetujui DPRD d. Persetujuan DRAF Raperda RPIK oleh		100	Bidang Perindustrian	Ada Bukti Pendukung

			gubernur perovinsi (15%) e. Penetapan Perda RPIK (10%)				
		502.	Persentase jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan $\frac{\quad}{\quad} \times 100 \%$ Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	$\frac{178}{178} \times 100$	100	PTSP Ada Bukti Pendukung
		503.	Persentase jumlah izin perluasan Industri (IPI) bagi industri kecil dan menengah yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan $\frac{\quad}{\quad} \times 100 \%$ Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	-	-	Bidang Perindustrian Belum ada permohonan pengajuan untuk penerbitan IPI
		504.	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasanindustri di kab/kota		$\frac{1}{1275} \times 100$	0,07	Bidang Perindustrian Ada Bukti Pendukung

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan _____ X 100 % Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam	-	-	Bidang Koperasi dan UKM	Koperasi yang bersangkutan belum memenuhi kewajibannya sebagai persyaratan pengurusan IUSP
		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kasusaha simpan pinjam _____ X 100 % Jumlah permohonan atau pengajuan yang masuk	-	-	Bidang Koperasi dan UKM	Koperasi yang berdomisili di daerah belum memungkinkan untuk membuka kantor cabang. (belum memenuhi syarat)
		Persentase dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa _____ X 100 % Jumlah Koperasi yang ada	$\frac{11}{167} \times 100$	6,58	Bidang Koperasi dan UKM	Ada Bukti Pendukung
		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan	Jumlah usaha simpan pinjam oleh kopeasi yang dinilai kesehatannya _____ x 100%	$\frac{25}{167} \times 100$	14,97	Bidang Koperasi dan UKM	Ada Bukti Pendukung

			wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada				
		376.	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan $\frac{\quad}{\quad} \times 100\%$ Jumlah koperasi yang ada	$\frac{22}{167} \times 100$	13,17	Bidang Koperasi dan UKM	Ada Bukti Pendukung
		377.	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / Kota	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian $\frac{\quad}{\quad} \times 100\%$ Jumlah Koperasi yang ada	$\frac{85}{167} \times 100$	50,89	Bidang Koperasi dan UKM	Ada Bukti Pendukung
		378.	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	-	-	-	Bidang Koperasi dan UKM	Belum ada koperasi yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
		379.	Persentase koperasi yang diberikan	-	-	-	-	Tidak perlu diisi

			dukungan fasilitasi pembiayaan					
		380.	Persentase fasilitasi pemberian sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) _____ X 100% Jumlah koperasi yang ada	$\frac{8}{167} \times 100$	4,79	Bidang Koperasi dan UKM	Ada Bukti Pendukung
		381.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan _____ X 100 % Jumlah koperasi yang ada	-	-	Bidang Koperasi dan UKM	Tidak ada lembaga keuangan yang menawarkan kerjasama kemitraan dalam bentuk bantuan pinjaman pembiayaan.
		382.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan pemasaran _____ X 100 % Jumlah koperasi yang ada	-	-	Bidang Koperasi dan UKM	Karena hampir sebagian besar koperasi yang ada bergerak di unit pertokoan dan usaha simpan pinjam
		383.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan _____ x 100 %	$\frac{15}{167} \times 100$	8,98	Bidang Koperasi dan UKM	Ada Bukti Pendukung

			keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang ada				
			Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan $\frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100\%$ Jumlah koperasi yang ada	-	-	Bidang Koperasi dan UKM	Persyaratan untuk menjadiin kefasama kemitraan sulit dipenuhi oleh koperasi yang ada
384.			Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru $\frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100\%$ Jumlah wirausaha yang ada	$\frac{261}{2519} \times 100$	10,36	Bidang Koperasi dan UKM	Ada Bukti Pendukung
385.			Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam system Online Data System (ODS)	Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam Sistem Data Online (ODS) $\frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100\%$ Jumlah usaha mikro yang ada	$\frac{4.870}{19.625} \times 100$	24,82	Bidang Koperasi dan UKM	Ada Bukti Pendukung
386.			Persentase jumlah usaha mikro yang ada	Jumlah usaha mikro yang bermitra $\frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100\%$ Jumlah usaha mikro yg ada	$\frac{25}{19.625} \times 100$	0,12	Bidang Koperasi dan UKM	Ada Bukti Pendukung
387.			Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi $\frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100\%$ Jumlah Usaha Mikro yang ada	$\frac{315}{19.625} \times 100$	1,60	Bidang Koperasi dan UKM	Ada Bukti Pendukung
388.								

		389.	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran _____ x 100% Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran	$\frac{80}{36} \times 100$	222,2	Bidang Koperasi dan UKM	Ada Bukti Pendukung
		390.	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan _____ x 100% Jumlah usaha mikro yang ada	$\frac{135}{19.625} \times 100$	0,68	Bidang Koperasi dan UKM	Ada Bukti Pendukung
		391.	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan pendampingan dan usaha kelembagaan dan usaha _____ x 100% Jumlah usaha mikro yg ada	$\frac{603}{19.625} \times 100$	3,07	Bidang Koperasi dan UKM	Ada Bukti Pendukung

Benteng, 17 Maret 2023

KERALA DINAS

ANDI ABDURRAHMAN, S.E., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

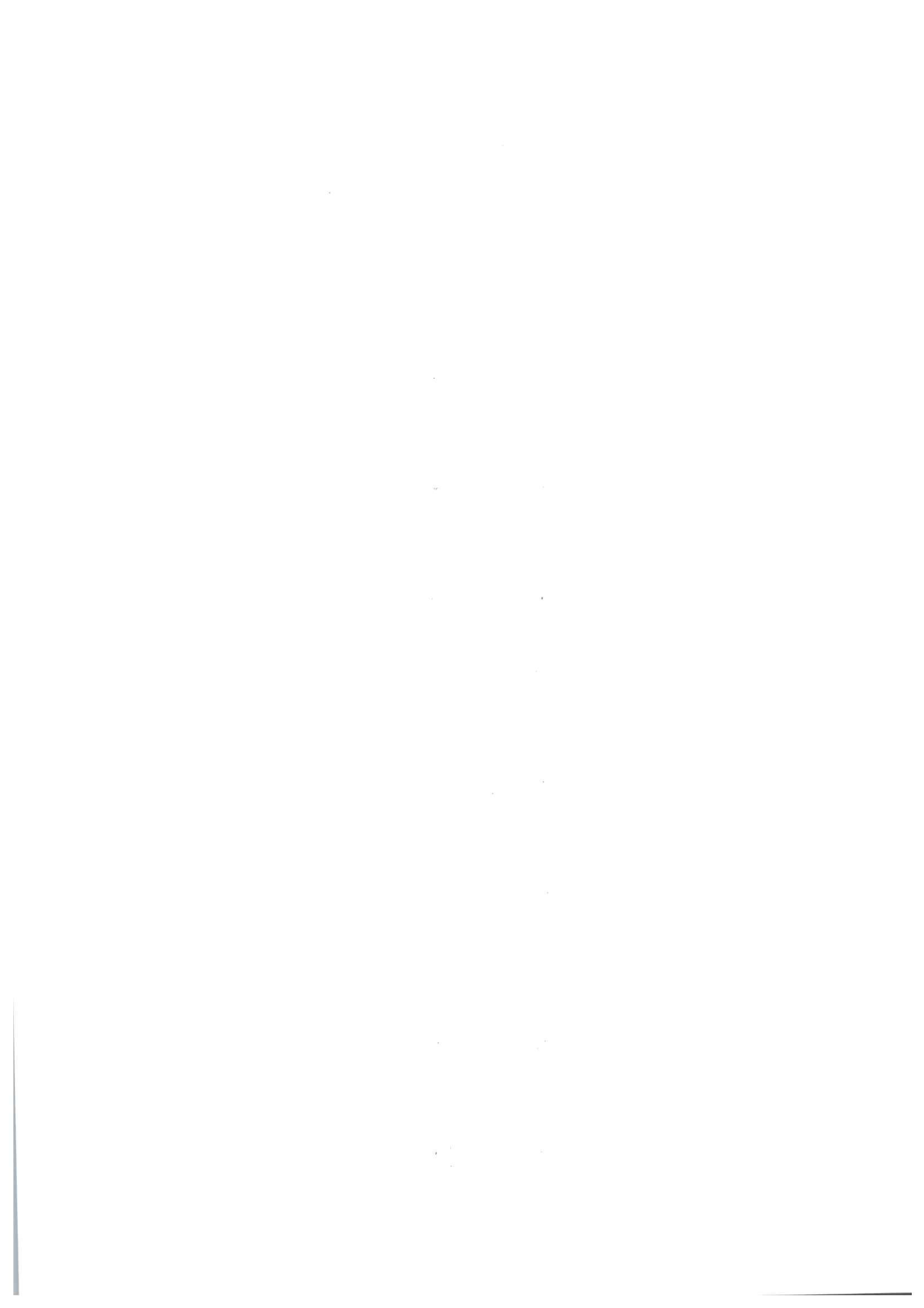
NIP. 19670526 199703 1 005



Indikator Kinerja Kunci Hasil / Outcome

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Bidang Perdagangan	97. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan $\frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100 \%$ Jumlah pelaku usaha di wilayah kabupaten / kota	$\frac{1232}{1232} \times 100$	100	Bidang Perdagangan	Ada Bukti Pendukung
		99. Persentase alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera SAH yang berlaku	Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun berjalan $\frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100 \%$ Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera ulang di wilayah kabupaten kota (2022)	-	-	-	Adanya kesalahan penyetaraan jabatan ke jabatan fungsional penera sehingga pelayanan tera dan tera ulang tidak dapat terlaksana

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja (%)	Sumber Data	Keterangan
1.	Bidang Perindustrian	100 Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	(Jumlah industri kecil dan menengah tahun n- jumlah Industri kecil dan menengah tahun n-1) \times 100 % Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1	$\frac{1300 - 1275}{1275} \times 100$	1,96	Bidang Perindustrian	Ada Bukti Pendukung
		101. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Jumlah kegiatan yang terlaksana Jumlah Rencana Kegiatan \times 100%		66,66	Bidang Perindustrian	Ada Bukti Pendukung
		102. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan \times 100 % Jumlah izin yang dikeluarkan	$\frac{116}{116} \times 100$	100	Bidang Perindustrian	Ada Bukti Pendukung



		103.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPU) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan $\frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100 \%$ Jumlah izin yang dikeluarkan	-	-	-	-	Belum ada permohonan pemberian IPU yang diajukan sehingga tidak ada pemantauan dan pengawasan
		104.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan $\frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100 \%$ Jumlah izin yang dikeluarkan	-	-	-	-	Belum pernah ada diterbitkan IUKI & IPKI
		105.	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan	-	100	Bidang Perindustrian	Ada Bukti Pendukung	
				Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan	-	100	Bidang Perindustrian	Ada Bukti Pendukung	
				Informasi produksi dan kapasitas produksi	43.598.712.170	100	Bidang Perindustrian	Ada Bukti Pendukung	
				Informasi bahan baku dan bahan penolong	23.513.245.730	100	Bidang Perindustrian	Ada Bukti Pendukung	
				Informasi bahan bakar / energy	-	-	-	Tidak pernah dilakukan pendataan	



							terkait bahan bakar / energy
			Informasi tenaga kerja	2.061	100	Bidang Perindustrian	Ada Bukti Pendukung

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, Volume usaha dan aset $\frac{\text{Jumlah seluruh koperasi}}{\text{Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha}} \times 100 \%$	$\frac{28}{167} \times 100$	16,66	Bidang Koperasi dan UKM	Ada Bukti Pendukung
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha $\frac{\text{Jumlah usaha mikro keseluruhan}}{\text{Jumlah usaha mikro}} \times 100 \%$	$\frac{4870}{19.625} \times 100$	24,81	Bidang Koperasi dan UKM	Ada Bukti Pendukung

Benteng, 17 Maret 2023

KEPALA DINAS



ANDI ABDURRAHMAN, S.E., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19670526 199703 1 005

